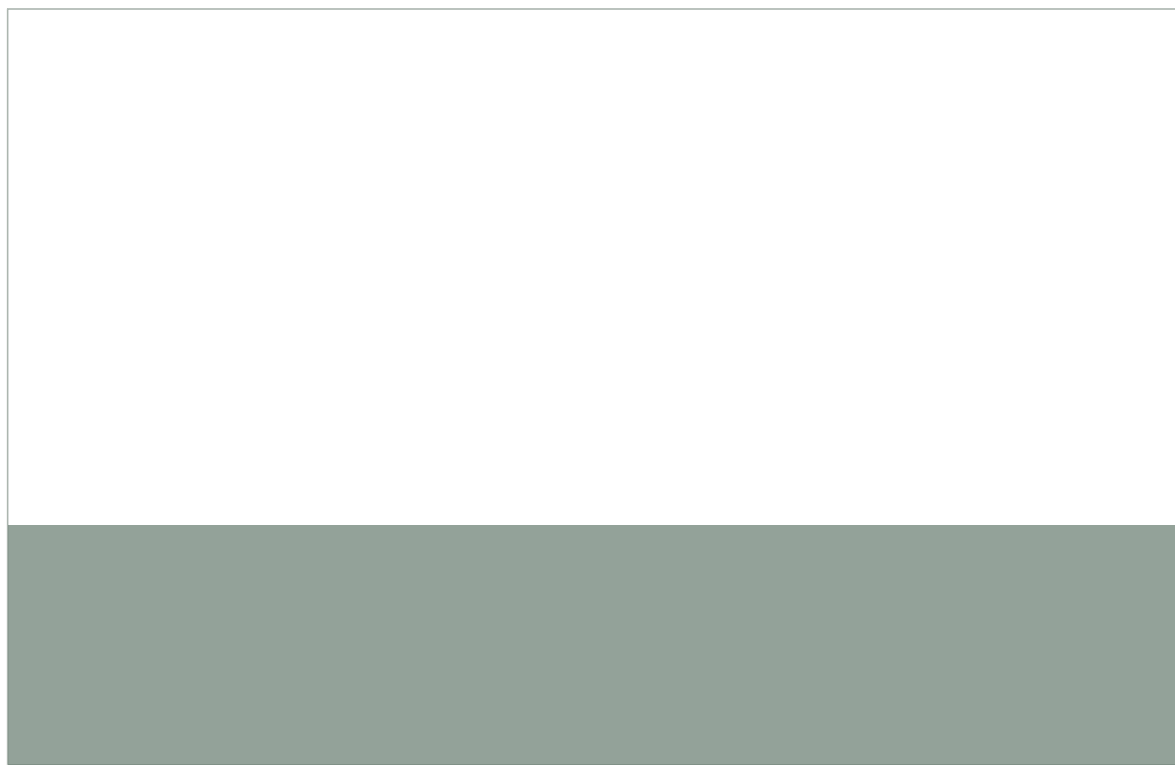




RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jl. Ahmad Yani No. 100 Telp. (0376) 2921033 Faks. (0376) 2922166

SELONG LOMBOK TIMUR NTB

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Perkenan-Nya jualah Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur untuk tahun anggaran 2020.

Dengan adanya Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten ini, diharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Lombok Timur, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri maupun sumber pendanaan lainnya.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur di tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur ini dapat berguna bagi kita semua.

Wabillahitaufik wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



dr. H. M. HASBI SANTOSO, M. Kes
NIP. 019660429 199703 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Perkenan-Nya jualah Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur untuk tahun anggaran 2020.

Dengan adanya Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten ini, diharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Lombok Timur, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri maupun sumber pendanaan lainnya.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur di tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur ini dapat berguna bagi kita semua.

Wabillahitaufik wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



dr.H.M. HASBI SANTOSO, M.Kes
NIP. 19660429 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1. Maksud	5
2. Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan Renja SKPD	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur	28
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	29
2.3.1 Masalah dan Hambatan Pelayanan Kesehatan	40
2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Pelayanan Kesehatan	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	46
3.3 Program dan Kegiatan	46
BAB IV. PENUTUP	51
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur hendaknya disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, rencana pembangunan kesehatan Kabupaten Lombok Timur dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25 ayat 2, dimana dalam pasal tersebut diatur tentang tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang. Dalam UU itu juga disebutkan bahwa Renstra SKPD sebagai rencana 5 tahunan SKPD, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.

Sejalan dengan hal tersebut diatas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 disebutkan bahwa bidang kesehatan merupakan kewenangan/urusan wajib bagi daerah sehingga kabupaten mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya dalam pengaturan dan penyelenggaraan upaya kesehatan. Dengan demikian kabupaten mempunyai peluang sekaligus tantangan untuk menyusun pembangunan kesehatan yang spesifik daerah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Secara substansi, Renja SKPD memuat evaluasi Renja SKPD tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018– 2023 serta dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018–2023,namun dengan tetap memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai

pada tahun sebelumnya, permasalahan yang ada, dan isu strategis yang akan dihadapi.

Renja SKPD ini juga memiliki peran strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis di bidang kesehatan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Oleh karenanya penyusunan Renja SKPD tahun 2020 ini juga mengacu kepada kebijakan di tingkat provinsi dan juga nasional, yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Renstra Kementerian Kesehatan, SPM Nasional Bidang Kesehatan dan juga rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun ditingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke provinsi maupun ke tingkat pusat.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus dan mengungkit capaian IPM, walaupun dengan keterbatasan - keterbatasan alokasi dana, sumber daya tenaga dan sarana maupun prasarana. Meskipun situasi anggaran kesehatan di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 sudah mencapai kondisi ideal yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan Tahun 2009 yaitu sebesar 11,2% namun kebutuhan anggaran masih perlu penambahan disebabkan adanya kebijakan pembangunan kesehatan selalu dinamis. Terlebih lagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur yang cukup besar, yaitu sebanyak 1.192.110 jiwa pada tahun 2018 anggaran tersebut dirasakan belum memadai. Permasalahannya adalah bagaimana kita dapat mengalokasikan anggaran yang cukup besar ke dalam program kegiatan yang sesuai kondisi permasalahan yang ada dan sesuai dengan kebijakan pusat maupun daerah serta proporsional antara program preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Disamping APBD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program kebijakan pusat dan Provinsi, Dinas Kesehatan juga mendapatkan dukungan dari APBN, APBD Provinsi dan PHLN.

Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019, termasuk di dalamnya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Dinas Kesehatan Tahun 2020.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Kinerja;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama tahun 2019.

2.Tujuan

- a. Melakukan evaluasi terhadap capaian rencana kerja SKPD tahun lalu dan capaian rencana strategis (Renstra).
- b. Melakukan analisis terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur terhadap Indikator Kinerja Utama, Indikator SPM dan Indikator IKK.
- c. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BABI PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BABII EVALUASIPELAKSANAAN RENJA SKPDTAHUN 2018

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.2.ANALISIS KINERJAPELAYANAN SKPD

2.3.ISU-ISUPENTINGPENYELENGGARAANTUGAS DAN FUNGSIKPD

2.4.REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5.PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BABIII TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAHAHANTERHADAPKEBIJAKANNASIONAL DAN PROVINSI

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 juga harus di lakukan evaluasi terhadap Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 dan perkiraan capaian pada Rencana Kerja Tahun 2018. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (di bawah), yang dapat dilakukan evaluasi secara berkesinambungan adalah indikator kinerja hasil (*outcome*) oleh karena indikator kinerja tersebut sudah mengacu kepada indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Namun untuk evaluasi indikator kinerja keluaran (*output*) terdapat kesulitan dalam menentukan tingkat keberhasilan pencapaian target indikator tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran tahunan (RKA/DPA) dalam perumusan dan penetapan indikator berbeda-beda setiap tahunnya, sehingga hal ini juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan kegiatan mana yang mencapai target dan mana yang tidak. Oleh karena itu, dalam evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu hanya dievaluasi terhadap indikator kinerja keluaran/hasil untuk tahun 2018 saja.

Pada tabel 2.1 tersebut, terdapat 23 program yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dengan jumlah indikator kinerja keluaran (*output*) sebanyak 98 indikator. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan yang telah mencapai kinerja sesuai target ada 19 kegiatan dan yang belum mencapai target ada 94 kegiatan. Faktor yang menjadi penyebab terhadap tidak tercapainya indikator keluaran tersebut antara lain tidak terealisasinya anggaran kegiatan dikarenakan jumlah anggaran daerah yang terbatas disamping perubahan waktu jadwal pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat. Namun demikian beberapa kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya dari APBD dapat pula terlaksana karena pada beberapa program/kegiatan disinergikan dengan sumber dana lainnya. Evaluasi kinerja berdasarkan

realisasi capaian anggaran menunjukkan 3 program atau 13,04% dengan capaian dibawah 70%, 19 program atau 82,6% dengan capaian kisaran 70% keatas dan hanya 1 program dengan capaian 100%. Berdasarkan evaluasi kegiatan menunjukkan 18,16% dengan capaian dibawah 50%, 12,24% kegiatan dengan capaian diantara 50% sd 75% dan sisanya 79,59 % kegiatan dengan capaian diatas 75%.

Hasil selengkapnya tentang evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan target kinerja program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

**2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

No/		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) atau Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2018				Jumlah Anggaran Tahun 2018			Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2019			
Kode		Belanja Langsung		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Alokasi	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Satuan	Target	Perkiraan Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	80	80	591.833.500	502.006.109	84,82	%	100	100	100
1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Air .	Bulan	12	12	100	148.200.000	145.070.699	97,89	Bulan	12	12	100
2	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pengelola Satker	Paket	12	12	100	169.350.000	165.750.000	97,89	Paket	12	12	100
3	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	ALat dan Bahan Pembersih Kantor	Paket	12	12	100	19.100.000	19.100.000	100,00	Paket	12	12	100
4	10	Penyediaan alat tulis	ATK Dinas	Jenis	22	22	100	27.778.500	27.778.500	100,00	Paket	22	22	100

		kantor												
5	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan	Paket	1	1	100	26.564.000	26.564.000	100,00	Paket	6	6	100
6	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bahan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Paket	1	1	100	5.000.000	5.000.000	100,00	Paket	3	3	100
7	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	20	20	100	92.650.000	80.680.000	87,08	Paket	13	13	100
8	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Eksemplar	72	72	100	3.240.000	3.185.000	98,30	Eksemplar	72	72	100
9	17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman rapat	Kali	610	400	65,57	19.500.000	4.500.000	23,08	Paket	8	8	100
10	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kali	8	3	37,5	80.451.000	24.377.910	30,30	Kali	7	7	100
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	1.252.230.000	1.230.415.210,00	98,26	%	100	100	100
1	5	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	45	45	100	1.022.400.000	1.022.250.000	99,99	Unit	50	50	100

2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Paket	1	1	100	100.000.000	99.900.000	99,9	Paket	1	1	100
3	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas	Unit	16	16	100	79.830.000	65.885.210,00	82,53	Unit	16	16	100
4		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor	Unit	1	1	100	25.000.000	17.460.000	69,8	Unit	1	1	100
5	30	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Puskes mas	32	32	100	25.000.000	24.920.000	99,68	Paket	32	32	100
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Jabatan Fungsional	%	100	100	100	85.420.000	81.419.850	95,3	%	100	100	100
1	4	Peningkatan kinerja jabatan fungsional	Penilaian Kinerja Jafung Kesehatan	Pusk	29	29	100	85.420.000	81.419.850	95,3	Pusk	32	32	100
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	66.320.000	64.280.000	96,9	%	100	100	100

1	5	Penatausahaan Keuangan dan Pemutakhiran Potensi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Pemutakhiran Potensi PAD	%	100	100	100	66.320.000	64.280.000	96,9	%	100	100	100
9		Peningkatan Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD)	Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah	%	100	100	100	53.600.000	50.440.000,00	94,10	%	100	100	100
1	1	Peningkatan manajemen pengelolaan asset/barang daerah (SIMDA BMD)	Terlaksananya Pengelolaan Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD)	Dokumen	1	1	100	53.600.000	50.440.000,00	94,10	Dokumen	1	1	100
15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Obat	Puskesmas	29	29	100	11.921.290.774	11.598.842.660	97,3	Pusk	29	29	100
1	1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Obat dan Perbekalan Kesehatan tersedia	Puskesmas	32	32	100	11.858.790.774	11.537.542.660	97,2	%	32	32	100
2	5	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Puskesmas	29	29	100	50.000.000	50.000.000	100,0	Pusk	29	29	100

3	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Puskes mas	29	29	100	12.500.000	11.300.000	90,4	Pusk	29	29	100
16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100	29.338.230.994	25.693.892.095	87,58	%	100	100	100
1	2	Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan	Pelaksanaan pertemuan program Kesehatan Masyarakat	Kali	2	2	100	84.168.500	77.848.500	92,5	Kali	2	2	100
2	9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelaksanaan Pertemuan dan Pengawasan Yankes Swasta	pkt	1	1	100	578.507.994	554.875.000,00	95,91	Paket	1	1	100
3	11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Terlaksannya yankes Pengungsi Korban Bencana	paket	1	1	100	75.000.000	65.133.000,00	86,84	Paket	1	1	100
4	13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Biaya Operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tersedia	Puskes mas	32	32	100	9.312.800.000	7.601.202.913,00	81,62	Pusk	32	32	100

5	14	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Minimal Kesehatan Lingkungan di Kab.Lotim	kegiatan	8	8	100	70.000.000	48.730.000,00	69,61	Kegiatan	8	8	100
6	16	Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Remaja	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Remaja	kasus	250	250	100	32.500.000	31.264.900,00	96,20	Kasus	250	250	100
7	17	Pelayanan Kapasitas Petugas Pelayanan Peduli Remaja (PKPR) dan PPkt dan TPPO	Peningkatan Kualitas Yankes Remaja oleh Puskesmas dan Peningkatan Yankes Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kali	2	2	100	16.842.500	16.834.400,00	99,95	Kali	2	2	100
8	19	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Upaya Pengendalian PTM	Puskesmas	32	32	100	42.500.000	42.500.000	100,0	Org	32	32	100
9	20	Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji	Puskesmas	29	29	100	26.000.000	26.000.000	100,0	%	100	100	100
10	39	Penyediaan biaya operasional kesehatan (BOK)	Tersedianya Biaya Operasional Pelayanan UKM di Puskesmas dan Jaringannya	Puskesmas	32	32	100	19.024.912.000	17.158.253.382	90,19	Paket	33	33	100

11		Kewaspadaan dini terhadap bencana	Terlaksananya kegiatan Kewaspadaan dini terhadap bencana	Orang	73	73	100	75.000.000	71.250.000	95,0	Petugas	45	45	100
17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Obat dan Makanan Masyarakat	%	100	100	100	30.000.000	29.520.000	98,4	%	100	100	100
1	1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanann	Kali	1	1	100	10.000.000	10.000.000	100,0	%	100	100	100
2	2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Lokasi	6	6	100	12.500.000	12.500.000	100,0	%	100	100	100
3	5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Kegiatan Monev dan Pelaporan	Kali	1	1	100	7.500.000	7.020.000	93,6	Kali	1	1	100
18		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Tercapainya Pengembangan Obat Asli Indonesia	Paket	1	1	100	15.000.000	15.000.000	100,0	Paket	1	1	100

1	3	Peningkatan Promosi obat dan bahan alam Indonesia di dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri	Lokasi	3	3	100	10.000.000	10.000.000	100,0	%	100	100	100
2	6	Monitoring evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Puskesmas	20	20	100	5.000.000	5.000.000	100,0	Kali	1	1	100
19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Penyebaran Informasi Kesehatan Masyarakat	%	100	85,71	85,71	470.500.000	402.769.000,00	85,60	%	100	100	100
1	1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya Penyebaran Informasi Kesehatan Masyarakat melalui Berbagai Media	Kali	48	48	100	189.850.000	184.886.500	97,4	%	80	80	100
2	4	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya Pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Kali	1	1	100	17.500.000	16.650.000,00	95,14	-	-	-	-
3	6	Kesehatan Anak Sekolah dan GSS	Terlaksananya pendataan penjangkaran anak sekolah	Kali	5	5	100	25.000.000	18.881.000	75,5	%	30	30	100

4	7	Promosi kesehatan dalam Peningkatan PHBS	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Kesehatan dalam Peningkatan PHBS	Kali	4	4	100	32.120.000	31.970.000	99,5	%	80	80	100
5	8	Peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan	Terselenggaranya kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan	%	80	70	87,5	76.030.000	37.529.000	49,4	%	80	80	100
6	9	Promosi, sosialisasi dan koordinasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Terlaksananya Promosi,sosialisai dan Koordinasi JPKM	Kali	8	8	100	107.500.000	101.340.000,00	94,27	%	100	100	100
7	10	Verifikasi dan Evaluasi Penyaluran Hibah/Bantuan Sosial	Terlaksananya kegiatan Verifikasi dan evaluasi penyaluran hibah/bansos	lokasi	5	5	100	22.500.000	11.512.500,00	51,17	Paket	1	1	100
20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Status Giza Masyarakat	%	100	100	100	175.098.500	164.190.500	93,8	%	100	100	100
1	1	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Puskes mas	29	29	100	25.000.000	24.992.000	99,97	Pusk	32	32	100
2	2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	PMT dan Vitamin Balita Gizi Buruk	kasus	29	29	100	28.400.000	21.100.000	74,3	%	100	100	100

3	3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Terlaksananya Penanggulangan KEP,AGB,GAKY dan KVA Balita	Puskes mas	29	29	100	69.100.000	65.500.000	94,8	Pusk	32	32	100
4		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Desa	1	1	100	10.000.000	9.999.500,00	100,0	Desa	1	1	100
5	4	Penanggulangan Gizi Lebih	Terlaksananya Penanggulangan Gizi Lebih	sekolah	87	87	100	17.500.000	17.500.000	100,0	%	60	60	100
6	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Gizi	Puskes mas	29	29	100	25.098.500	25.098.500	100,0	Pusk	32	32	100
21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kegiatan pengembangan lingkungan Sehat Semakin Baik	%	100	100	100	154.500.000	154.100.000	99,7	%	100	100	100
1	1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Kali	1	1	100	15.000.000	15.000.000	100,0	Kegiatan	1	1	100

2	2	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Desa	64	64	100	15.000.000	15.000.000	100,0	Kegiatan	1	1	100
3	3	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Workshop Sanitasi Lingkungan Sehat	Kali	1	1	100	12.500.000	12.500.000	100,0	Kegiatan	1	1	100
4	5	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)	Terlaksananya Penyusunan Draf Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) UPTD	Buku	14	14	100	112.000.000	111.600.000	99,6	-	-	-	-
22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya Jumlah Kasus Penyakit Menular	%	100	100	100	344.055.000	231.149.500,00	67,18	%	100	100	100
1	1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	lokasi	50	50	100	75.000.000	41.794.000	55,7	%	100	100	100
2	4	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Pelayanan Imunisasi Anak Bayi	%	100	100	100	104.805.000	53.570.000,00	51,11	%	100	100	100

3	5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Penemuan Kasus TB BTA(+) Baru	Kali	2	2	100	78.000.000	78.000.000,00	100	Kali	2	2	100
4	6	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare dan Malaria	orang	48	48	100	23.750.000	21.586.000,00	90,89	Kasus	163,66 7	163,66 7	100
5	9	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Pemantauan Penyakit Potensial Wabah di Wilayah Lombok Timur dan Penanggulangan KLB yang ditangani < 24 jam	Puskes mas	32	32	100	62.500.000	36.199.500,00	57,2	Pusk	32	32	100
23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Sesuai SOP	%	100	100	100	3.141.100.000	2.661.328.528,00	84,7	%	100	100	100
1	2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Puskes mas	32	32	100	50.000.000	35.979.000	71,96	%	100	100	100

2	3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Puskes mas	32	32	100	20.000.000	1.131.000	5,7	%	100	100	100
3	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Puskesmas	Puskes mas	32	32	100	10.000.000	5.925.000	59,3	%	100	100	100
4		Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Akreditasi di 15 Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur	Puskes mas	15	15	100	3.029.000.000	2.601.643.528	85,9	Pusk	11	11	100
5	8	Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan	Kali	2	2	100	32.100.000	16.650.000,00	51,87	Kali	1	1	100
24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkat	%	100	100	100	80.958.000	78.295.000	96,7	%	100	100	100
1	1	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya Skrining dan Operasi Katarak	Kali	2	2	100	10.000.000	10.000.000	100,0	%	100	100	100
2	2	Pelayanan kesehatan THT	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan THT	Kali	1	1	100	5.000.000	5.000.000	100,0	Kali	1	1	100

3	3	Pelayanan operasi bibir sumbing	Pelaksanaan Konsultasi dan Pendampingan Pelayanan Operasi Bibir Sumbing	Kali	2	2	100	8.020.000	6.320.000	78,8	Kali	2	2	100
4	4	Pelayanan sunatan masal	Terlaksananya Pelayanan Hitanan Masal	Kali	4	4	100	7.938.000	6.975.000	87,9	Kali	4	4	100
5	5	Penanggulangan ISPA	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyakit ISPA/Pneumonia	Puskes mas	32	32	100	7.500.000	7.500.000	100,0	Paket	1	1	100
6	6	Penanggulangan penyakit cacangan	Terlaksananya Upaya Pencegahan Penyakit Kecacangan Pada Siswa SD/MI dan Balita	Puskes mas	32	32	100	5.000.000	5.000.000	100,0	%	100	100	100
7	7	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin	Penemuan, Pengobatan dan Penanggulangan Penyakit IMS dan HIV/AIDS	Puskes mas	30	30	100	7.500.000	7.500.000	100,0	%	90	90	100
8	9	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu	Terlaksananya Surveillance AFP di Wilayah Kabupaten Lombok Timur	Kali	1	1	100	5.000.000	5.000.000	100,0	Pusk	32	32	100
9	11	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa	Puskes mas	32	32	100	25.000.000	25.000.000	100,0	%	100	100	100

25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Kualitas Pelayanan kesehatan Masyarakat Semakin Meningkat	%	100	83,33	83,33	81.769.077.180,00	75.540.180.715	92,4	%	100	100	100
1	1	Pembangunan Puskesmas	Terlaksananya Pembangunan/Penambahan Ruang Puskesmas	Puskesmas	10	9	90	36.990.032.000	32.041.839.000	86,6	Pusk	11	11	100
2	4	Pengadaan Puskesmas keliling	Terlaksananya Pengadaan Puskesmas keliling	Unit	20	20	100	7.128.469.000	7.121.326.000	99,9	Unit	1	1	100
3	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Paket	221	221	100	27.917.827.180,00	27.868.790.715	99,8	Paket	312	312	100
4	21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu	Unit	2	2	100	364.168.963	340.700.000	93,6	Unit	19	19	100
5	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Unit	5	5	100	9.246.060.037	8.052.675.000	87,1	Unit	1	1	100
6	25	Rehabilitasi Poskesdes	Terlaksananya Rehabilitasi Poskesdes	Unit	1	1	100	122.520.000	114.850.000	93,7	-	-	-	-

28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Motivasi dan Kinerja Petugas Kesehatan	%	100	100	100	31.000.000	7.550.000	24,35	%	100	100	100
1	5	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Terlaksananya kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	%	100	100	100	31.000.000	7.550.000	24,35	%	100	100	100
29		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Target Capaian Indikator Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	%	2	2	100	69.239.000	45.979.500	66,4	Kl/thn	2	2	100
1	1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terlaksanakannya penyuluhan kesehatan balita ke masyarakat	Kali	1	1	100	24.939.000	24.189.000,00	96,99	kl/thn	2	2	100
2	4	Pelatihan dan Pendidikan perawatan anak Balita	Terlaksanakannya Pelatihan APN Bagi Semua Bidan Desa	Kali	2	2	100	39.500.000	19.390.500,00	49,09	Kl/thn	1	1	100
3	7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Program KIA dan KB di Semua Puskesmas	Puskes mas	2	2	100	4.800.000	2.400.000	50,0	Kl/thn	2	2	100

30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Kesehatan Lansia Semakin Meningkat	%	100	100	100	52.500.000	52.097.320,00	99,23	%	100	100	100
1	1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Puskes mas	32	32	100	25.000.000	24.970.000	99,8	Kali	1	1	100
2	3	Pendidikan dan Pelatihan Perwatan kesehatan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan perawatan bagi lansia	Puskes mas	10	10	100	25.000.000	24.850.320,00	99,40	Kali	2	2	100
3	7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pada Tingkat Puskesmas	Puskes mas	32	32	100	2.500.000	2.277.000,00	91,08	Kali	1	1	100
32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Anak	%	100	100	100	3.214.204.500	3.075.089.183,00	95,67	%	100	100	100
1	1	Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Terlaksananya Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil	Kali	5	5	100	62.000.500	62.000.500	100,00	Kl/thn	2	2	100
2	3	Pertolongan Persalinan bagi ibu kurang mampu	Terlaksananya Pertolongan bagi persalinan ibu kurang mampu	Kali	5	5	100	2.723.903.000	2.595.867.683	95,3	%	100	100	100

3	4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Kegiatan AMP Tingkat Kabupaten	kali/th	1	1	100	425.811.000	416.061.000,00	97,71	Kl/thn	1	1	100
4	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Program KIA dan KB	Puskesmas	32	32	100	2.490.000	1.160.000	46,6	Kl/thn	1	1	100
34		Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas	%	100	100	100	191.469.500	159.863.388,00	83,49	%	100	100	100
	1	Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penyusunan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Dinas	dokumen	9	9	100	97.645.000	78.328.888,00	80,22	dokumen	9	9	100
	2	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	Terlaksananya Pengembangan SIKDA	Puskesmas	32	32	100	93.824.500	81.534.500,00	86,90	Pusk	32	32	100
35		Program Upaya Kesehatan Perorangan	Tersedianya Jaminan Kesehatan perorangan mandiri	%	100	86,56	86,56	97.360.405.941	69.718.788.516	71,61	Pusk	29	29	100

1	1	Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi	Terlaksananya Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi	%	100	59,7	59,7	66.046.125.811	50.997.141.152	77,2	Pusk	32	32	100
2	2	Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	Tersedianya Jaminan Kesehatan Bagi Pasien Rawat Inap	Puskesmas	29	29	100	22.000.000.000	12.144.926.000	55,20	Pusk	32	32	100
3	3	Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Tanggunagn BPJS	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Tanggunagn BPJS	jiwa	9000	9000	100	9.314.280.130	6.576.721.364	70,61	%	60	60	100
36		Program Sumberdaya Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	%	100	100	100	496.467.500	487.481.576,00	98,19	%	100	100	100
1	1	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM kesehatan (Teknis dan Fungsional)	Kali	1	1	100	388.467.500	384.701.576,00	99,03	Kali	1	1	100
2	2	Peningkatan pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan Puskesmas/jaringannya	Terlaksananya kegiatan Peningkatan pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan Puskesmas/jaringannya	Puskesmas	32	32	100	108.000.000	102.780.000,00	95,17	Puskesmas	32	32	100
TOTAL								230.904.500.389	192.044.678.150	83,17				

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu kabupaten di Antara sepuluh kabupaten / kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di sebelah timur pulau Lombok. Bila ditinjau dari letak geografis terletak antara 116°- 117° BT, dan 8°- 9°LS, dimana secara administrative batas Kabupaten Lombok Timur adalah sebelah Utara Laut Jawa, Sebelah Selatan Samudera Indonesia, Sebelah Barat Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara dan Sebelah Timur Selat Alas.

Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 21 kecamatan 254 desa/kelurahan. Dan berdasarkan kondisi perwilayahan, Kabupaten Lombok Timur mempunyai luas 2.679,88 Km² yang terdiri atas daratan seluas 1.605,55 Km² (59,91%) dan pantai/lautan diukur 4 mil dari bibir pantai adalah seluas 1.047,33 Km² (40,09%). Dari 21 kecamatan yang ada saat ini, kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Sambelia ± 245,22 Km² (15,27%) dari luas wilayah Kabupaten Lombok Timur), sedangkan wilayah kecamatan yang tersempit adalah Kecamatan Sukamulia yaitu ± 14,49Km² (0,90% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Timur).

Selanjutnya jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018 sebanyak 1.92.110 yang tersebar di 21 kecamatan, dengan luas wilayah daratan sebesar 1.605.55 Km², sehingga diperoleh kepadatan penduduk di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018 sebesar 737 jiwa/Km². Sedangkan total rumah tangga sebanyak 347.122 rumah tangga, sehingga diperoleh rata-rata jiwa per rumah tangga sebanyak 3,41 jiwa/RT.

Kondisi geografis dengan luasnya wilayah Kabupaten Lombok Timurdan kondisi kependudukan dengan besarnya jumlah penduduk tersebut memberikan peluang dan tantangan karena mempunyai dampak terhadap timbulnya masalah kesehatan yang komprehensif, oleh karena itu program/kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki tolok ukur serta indicator yang lengkap sehingga akan mudah dalam melakukan evaluasinya.

Penetapan indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur, disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Dalam menilai tingkat kinerja pelayanan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memiliki Indikator Kinerja yang tertuang dalam Standar Pelayanan Kesehatan (SPM). Indikator ini bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil capaian indikator pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.2.1 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PROGRAM /KEGIATAN**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program/Kegiatan	Satuan	Tahun 2018			
			Target	Realisasi	%	Pencapaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100	Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	95,96	95,96	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	99,30	99,30	Tidak Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	20,14	20,14	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100	64,98	64,98	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	31,80	31,80	Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	50,13	50,13	Tidak Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	65,33	65,33	Tidak Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	%	100	100	100	Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100	20,34	20,34	Tidak Tercapai

Bila dibandingkan hasil capaian indikator pelayanan kesehatan dengan target yang ditetapkan di atas terdapat 8 indikator pelayanan yang belum mencapai target.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program

dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra.

Isu-isu penting yang dirumuskan berkaitan dengan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan.

Kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2018 yang diukur dengan indikator-indikator sebagian besar sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan, namun demikian masih ada kendala maupun hambatan terutama yang menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat. Berikut diuraikan isu-isu dalam penyelenggaraan kesehatan.

1) Angka Harapan Hidup

Peningkatan Umur Harapan Hidup waktu lahir (Eo) atau UHH dari tahun ke tahun dapat dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan upaya kesehatan yang telah dilakukan di Kabupaten Lombok Timur. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2018 sebesar 65,41. Dibandingkan dengan target Angka Harapan Hidup pada tahun 2018 yakni 63,41, berarti sudah mencapai target.

2) Angka Kematian dan Kesakitan

a) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Bayi cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi dan juga relevan digunakan untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita.

Kematian Balita adalah kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial dalam arti besar dan tingkat kemiskinan penduduk, sehingga sering dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk

Berdasarkan Laporan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan

Anak (PWS- KIA) di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018, jumlah kasus kematian bayi sebanyak 227 kasus dengan AKB 8 per 1.000 Kelahiran Hidup) yang terdiri dari kematian neonatal sejumlah 173 kasus dan post natal 54 kasus. Jumlah kasus kematian Balita sejumlah 239 kasus dengan Angka Kematian Balita sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab terbanyak terjadinya kematian bayi (post natal) adalah Pnemonia sebesar 48,1% dan sebab lain-lain sebesar 46,2%. Demikian juga pada kasus kematian Anak Balita terbanyak disebabkan oleh Pnemonia.

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan terjadi penurunan angka kematian bayi sebesar 5 per 1.000 dibanding tahun sebelumnya 13 per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Lombok Timur. Demikian juga pada Angka Kematian Balita terjadi penurunan sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup dari tahun sebelumnya 14 per 1.000 kelahiran hidup. Ini menunjukkan kelangsungan hidup anak di Kabupaten Lombok Timur semakin meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017.

b) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas.

Berdasarkan Laporan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS- KIA) di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018, jumlah kasus kematian ibu sebesar 34 kasus yang terdiri dari kematian ibu hamil sejumlah 5 kasus, kematian ibu bersalin sejumlah 14 kasus dan kematian ibu nifas sejumlah 15 kasus dengan Angka Kematian Ibu (AKI) 125 per 100.000 Kelahiran Hidup. Target cakupan Angka Kematian Ibu untuk tahun 2018 adalah 100 per 100.000 kelahiran hidup, berarti sudah melampaui target. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dimana AKI sebesar 84 per 100.000 kelahiran hidup, terjadi peningkatan sebesar 41 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2018 terbanyak disebabkan oleh HDK (Hipertensi dalam kehamilan) sebesar 38,24% diikuti pendarahan (HPP) sebesar 23,53% dan lain-lain sebesar 29,41%. Pola penyebab kematian ibu pada tahun ini masih sama dengan tahun yang lalu dimana pendarahan

masih merupakan penyebab tertinggi penyebab kematian ibu. Tingginya kematian ibu yang disebabkan oleh HDK tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu dari sebelum dan selama hamil. Disamping itu kasus-kasus kematian ini terjadi juga disebabkan oleh keterlambatan masyarakat dalam membuat keputusan terutama dipihak keluarga sebagai pemberi keputusan sehingga terjadi keterlambatan dirujuk, terlambat ditangani yang berakibat fatal baik pada ibu maupun pada bayinya.

3) Angka Kesakitan

Angka kesakitan penduduk diperoleh dari data yang berasal dari masyarakat (*community based data*) yang diperoleh melalui survei, dan hasil pengumpulan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta dari sarana pelayanan kesehatan (*facility based data*) yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan.

a) Penderita TB Paru BTA+

Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ (*Cure Rate*) merupakan salah satu indikator keberhasilan tata laksana penderita TB Paru BTA+. Angka kesembuhan TB Paru BTA+ adalah jumlah penderita TB Paru BTA+ yang sembuh pada suatu wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penderita TB Paru BTA+ yang diobati pada suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama. Dapat disembuhkan artinya penderita TB Paru yang setelah menerima pengobatan Anti TB Paru dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif).

Di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 terdapat 1.453 kasus baru TB Paru BTA+ yang terdiri dari laki-laki sebanyak 852 kasus (58,6%) dan perempuan sejumlah 605 kasus (41,6%). Jumlah orang terduga TB+ sesuai standar adalah 12.882 orang, maka persentase orang terduga TB Paru BTA+ mendapat pelayanan sesuai standar sebesar 11,3%. Dari jumlah tersebut yang berhasil melaksanakan pengobatan lengkap sebanyak 394 kasus (24,7%) dan jumlah pasien tuberculosis meninggal selama masa pengobatan sejumlah 68 kasus atau sebesar 4,3%. Sementara insiden tuberculosis anak yang ditemukan sejumlah 510 kasus atau sebesar 7,25%.

b) Balita Pneumonia

Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan atau napas sesak. Sedangkan cakupan Balita dengan pneumonia yang ditangani adalah

cakupan penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia pada Balita yang mendapat antibiotik sesuai standar atau pneumonia berat dirujuk ke RS di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018, perkiraan penemuan Pneumonia pada Balita adalah sejumlah 7.606 kasus. Dalam pelaksanaannya penemuan Pnemonia tercatat sejumlah 6.817 kasus (89,6%) yang terdiri atas 3.716 kasus dengan jenis kelamin laki-laki dan 3.101 kasus perempuan. Dari total 7.606 kasus Pnemonia yang ada dibedakan menjadi Pnemonia ringan sejumlah 6.401 kasus (3.457 kasus laki-laki dan 2.944 kasus perempuan) dan Pnemonia berat sejumlah 416 kasus (259 kasus jenis kelamin laki-laki dan 157 kasus perempuan).

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa penemuan kasus Pnemonia pada tahun 2018 sudah mencapai target yang ditetapkan yakni 80%. Dilihat dari penemuan kasus Pnemonia tahun 2017 sebesar 81,54%, maka penemuan dalam tahun ini terjadi peningkatan sebesar 8,06%. Dilihat penyebarannya berdasarkan jenis kelamin, penemuan kasus Pnemonia pada tahun ini terbanyak pada jenis kelamin laki-laki sebesar 54,51% dan jenis kelamin perempuan sebesar 45,49%. Disamping itu dapat diketahui juga perkembangan Pnemonia menjadi Pnemonia berat sebesar 6,1% yang perlu penanganan lebih serius sehingga tidak menimbulkan kematian. Dari jumlah 416 kasus Pnemonia berat hanya sebesar 7,21% (30 kasus) menjadi penyumbang kematian bayi dan Balita. Namun dilihat dari jumlah 239 kematian Balita di Kabupaten Lombok Timur, Pnemonia menyumbang kematian pada Balita sebesar 12,55%.

c) **Penderita HIV-AIDS**

HIV-AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan Voluntary, Counseling, and Testing (VCT), sero survey, dan Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Penemuan penderita HIV di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 sebanyak 13 kasus, dan penderita AIDS sebanyak 11 kasus dengan

kasus kematian sejumlah 3 kasus. Sedangkan Penemuan HIV pada tahun 2016 sebanyak 4 kasus atau mengalami peningkatan tiga kali lipat lebih, dan penemuan AIDS sebanyak 13 kasus atau peningkatan dua kali lebih dibanding tahun 2017.

e) Penderita Diare

Penyakit diare sampai kini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, walaupun secara umum angka kesakitan masih berfluktuatif namun penyakit ini masih sering menimbulkan KLB yang cukup banyak bahkan menimbulkan kematian.

Penderita diare yang ditangani yaitu jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 20% dari angka kesakitan dikalikan jumlah penduduk di satu wilayah dalam waktu satu tahun. Target penemuan kasus diare yang digunakan adalah dengan angka kesakitan diare 270 per 1.000 penduduk.

Penemuan penderita penyakit Diare pada Balita sebesar 93,1% (23.804 Balita) dari jumlah 25.566 Balita di Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan penderita Diare pada golongan semua umur ditemukan sejumlah 45.881 orang (71,3%) dari jumlah 64.374 golongan semua umur. Dari jumlah tersebut semuanya mendapat penanganan standar yakni dengan pemberian Oralit dan Zinc pada setiap penderita. Dibandingkan dengan penemuan kasus pada tahun 2017 sebesar 81,81%, penemuan kasus Diare pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 11,29%. Target indikator penemuan dan penanganan penyakit diare adalah sebesar 100%. Jadi cakupan penemuan penyakit Diare masih belum mencapai target, sedangkan penanganan penderita Diare sudah mencapai 100%.

f) Penderita Kusta

Penderita kusta adalah seorang penderita yang ditemukan dengan ciri-ciri antara lain, (1) Kulit dengan bercak putih atau kemerahan disertai mati rasa atau anestesi, (2) Penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf berupa mati rasa dan kelemahan/kelumpuhan pada otot tangan, kaki dan mata, kulit kering serta pertumbuhan rambut yang terganggu, dan (3) pada pemeriksaan kerokan jaringan kulit (*slit=skin=smear*) didapatkan adanya kuman *M. Leprae*.

Penemuan kasus baru penderita kusta pada tahun 2018 di Kabupaten Lombok Timur sejumlah 11 kasus yang semuanya dari jenis Kusta basah (Multi Basiler). Dari jumlah tersebut 2 diantaranya berjenis kelamin

perempuan dengan proporsi 18,2% dan 9 kasus berjenis kelamin laki-laki dengan proporsi 81,8%. Dengan demikian angka penemuan kasus (NCDR) pada tahun 2018 diperoleh sebesar 0,9 per 100.000 penduduk. Dibandingkan dengan angka penemuan kasus Kusta tahun 2017 sebesar 1,52 per 100.000 penduduk, berarti terjadi penurunan penemuan kasus sebesar 0,62 per 100.000 penduduk.

g) Acute Flaccid Paralysis (AFP) Anak Usia < 15 Tahun

Acute Flaccid Paralysis (AFP) adalah penderita dengan gejala lumpuh layuh mendadak (akut), bukan disebabkan ruda paksa, yang ditemukan pada anak usia <15 tahun dan diduga kuat poliomyelitis.

Di Kabupaten Lombok Timur pada tahun tahun 2017, jumlah kasus AFP sejumlah 4 kasus dan jumlah penduduk <15 Tahun sebanyak 357.590 jiwa. Dengan demikian AFP Rate tahun 2018 sebesar 1,1 per 100.000 1,12 sejumlah 4 kasus. Target indikator AFP Rate per 100.000 penduduk <15 tahun 2018 sebesar 8 per 100.000 penduduk. Jadi AFP Rate per 100.000 penduduk <15 tahun masih dibawah target. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penemuan kasus AFP adalah pelacakan dan sekrening kasus AFP yang belum maksimal.

i) Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penderita demam tinggi mendadak berlangsung 2-7 hari, disertai manifestasi perdarahan (antara lain uji tourniquet positif, petekie, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis dan/atau melena, dsb) ditambah trombositopenia (trombosit $\leq 100.000/\text{mm}^3$) dan hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit $\geq 20\%$). Sedangkan Angka Kesakitan DBD adalah jumlah kasus DBD yang ditemukan pada suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama. Angka kematian DBD (Case Fatality Rate) adalah jumlah kematian yang disebabkan DBD pada kurun waktu tahun tertentu.

Penemuan dan penanganan penderita DBD di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018 menurut data Dinas Kesehatan sejumlah 34 orang yang terdiri dari 24 orang berjenis kelamin laki-laki dan 10 orang perempuan dengan insiden rate sebesar 2,0 per 100.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan penemuan tahun 2017 sejumlah 350 kasus dengan insiden rate sebesar 29,58 per 100.000 penduduk, pencapaian penemuan kasus DBD jauh menurun hampir 10 kali lipat lebih. Semua penderita dapat ditangani secara baik sehingga tidak menimbulkan kematian. Target indikator penemuan dan penanganan penderita DBD sebesar 100%. Jadi cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD telah mencapai target.

Berdasarkan lokasi penemuan, bahwa penemuan kasus DBD pada tahun 2018 tersebar pada sebelas Puskesmas. Penyebaran kasus terbanyak terdapat di wilayah kerja Puskesmas Selong sebesar 32,35%, Puskesmas Keruak dan Kerongkong masing-masing sebesar 11,76%. Pada tahun 2017 penyebaran kasus ditemukan pada 15 lokasi Puskesmas dan Puskesmas terbanyak penemuan kasusnya masih tetap berada pada wilayah Puskesmas Selong. Bila diperhatikan Lokasi penyebaran penemuan kasus DBD pada tahun ini, kejadian penemuan kasus DBD terdapat pada lokasi Puskesmas yang sama dengan tahun lalu kecuali hanya satu Puskesmas baru yakni di wilayah Puskesmas Masbagik.

j) Penyakit Malaria

Penyakit malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas komitmen global dalam Millenium Development Goals (MDGs). Berbagai upaya penanggulangan telah dilaksanakan dengan menggali berbagai sumber dana, baik dari pemerintah maupun non pemerintah antara lain World Health Organisation (WHO) dan Global Fund (GF). Untuk percepatan penanggulangan malaria dilakukan berbagai intervensi antara lain: kelambu berinsektisida untuk penduduk berisiko, pengobatan yang tepat untuk subjek terinfeksi malaria dengan Artemisinin-based Combination Therapy (ACT), dan penyemprotan rumah dengan insektisida (Risksdas 2010).

Penyakit malaria menyebar cukup merata di seluruh kawasan Indonesia, namun paling banyak dijumpai di luar wilayah Jawa dan Bali, bahkan di beberapa tempat dapat dikatakan sebagai daerah endemis malaria. Menurut hasil pemantauan program diperkirakan sebesar 35% penduduk Indonesia tinggal di wilayah endemis, dan sampai saat ini malaria masih menjadi ancaman di daerah-daerah pesisir pantai Kabupaten Lombok Timur.

Angka Kesakitan Malaria (AMI/API) adalah jumlah penderita tersangka malaria dan atau positif malaria dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama. Sedangkan pengertian suspek Malaria didefinisikan adalah setiap individu yang tinggal di daerah endemik malaria yang menderita demam atau memiliki riwayat demam dalam 48 jam terakhir atau tampak anemi; wajib diduga malaria tanpa mengesampingkan penyebab demam yang lain.

Di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 ditemukan kasus Malaria positif sejumlah 42 kasus yang terdiri dari 35 kasus dengan jenis

kelamin laki-laki dan 7 kasus jenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut dapat diketahui besarnya angka kesakitan Malaria sebesar 0,035 per 1.000 penduduk.

Angka kesakitan malaria (annual parasite incidence) per 1.000 penduduk beresiko adalah sebesar 0,06 atau menurun dari tahun sebelumnya (API tahun 2016 adalah 0,26). Ini berarti angka kesakitan malaria di Kabupaten Lombok Timur masih berada dibawah standar API 1 per 1.000 penduduk.

k) Penyakit Tidak Menular (PTM)

Pembangunan bidang kesehatan saat ini dihadapkan pada peningkatan kasus-kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) atau Penyakit Akibat Gaya Hidup, serta penyakit degeneratif. Kecenderungan ini dipacu oleh perubahan gaya hidup akibat urbanisasi, modernisasi dan globalisasi.

Beberapa PTM yang dialami oleh sebagian besar masyarakat antara lain hipertensi, stroke, penyakit jantung obstruksi kronis, penyakit paru obstruksi kronis, diabetes melitus, rheumatoid arthritis, gagal ginjal kronis, hipertiroid, kanker payudara, kanker mulut rahim, dan kecelakaan. Sedangkan faktor risiko yang memicu kejadian penyakit tersebut antara lain kebiasaan merokok, minum alkohol, sering makan asin, sering makan/minum manis, makanan tinggi lemak, kurang sayur/buah, kurang aktifitas fisik, stress, berat badan lebih, dan obesitas.

Data Dinas Kesehatan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sejumlah 27.744 orang yang terdiri dari penderita hipertensi berjenis kelamin laki-laki 10.952 orang dan 16.792 orang perempuan. Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 18 tahun diperkirakan sejumlah 87.911 jiwa. Dari data tersebut dapat dihitung besarnya jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan adalah 31,6%.

Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) di Kabupaten Lombok Timur menurut data Dinas Kesehatan tercatat sejumlah 6.443 orang (49,8%) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari sasaran 12.935 penderita DM.

Hasil skrining deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim menurut data Dinas Kesehatan tercatat sejumlah 1.442 orang yang menjadi sasaran pelaksanaan dari target 156.378 jiwa di Kabupaten Lombok Timur. Dari

jumlah tersebut yang menunjukkan hasil positif menderita kanker leher Rahim melalui pemeriksaan IVA sebesar 2,4% (34 orang), yang dicurigai kanker payudara sebesar 1,7% (24 orang) dan sudah dapat teraba (adanya benjolan) sebesar 0,8% (12 orang).

4) Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun . Anak balita sehat atau kurang gizi secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umurnya, dengan rujukan(standar) yang telah ditetapkan . Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik . Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk . Gizi buruk adalah salah satu bentuk kekurangan gizi tingkat berat . Gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda klinis disebut marasmus atau kwashiorkor, di masyarakat lebih dikenal sebagai "busung lapar".

Mulai pada tahun 2018 ini pemantauan gizi Balita dilaksanakan dengan format terbaru yakni dengan melihat jumlah Balita Gizi Kurang (BB/Umur), Balita Pendek (TB/Umur), dan Balita Kurus (BB/TB). Hasil pemantauan status gizi (PSG) di wilayah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan jumlah Balita ditimbang adalah sejumlah 62.968 Balita, yang termasuk kedalam kategori Balita Gizi Kurang (BB/U) sebesar 14,5% (9.119 Balita). Hasil pengukuran tinggi badan dari jumlah 66.030 Balita menunjukkan Balita Pendek (TB/U) sebesar 32,5% (20.435 Balita), dan hasil pengukuran Balita Kurus mencapai hasil sebesar 4,4% dari jumlah 62.571 Balita diukur.

Target kabupaten untuk cakupan Balita Gizi Kurang pada tahun 2018 ditetapkan sebesar 10%, dan Kependekan Balita (Stunting) sebesar 20%. Dari hasil pendataan tersebut menunjukkan kondisi pemantauan status gizi Balita pencapaiannya cukup tinggi dari target yang ditetapkan

5) Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan Masih Kurang

Kuantitas sumber daya manusia kesehatan masih kurang termasuk beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada, hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah puskesmas baru dan beberapa formasi tenaga yang belum terpenuhi di puskesmas, tidak meratanya penyebaran/penempatan tenaga kesehatan yang akan berpengaruh pada beban kerja yang tidak merata juga sehingga akan berpengaruh pada kualitas pelayanan.

Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih sangat

kurang bila dibandingkan dengan standar tenaga kesehatan yang seharusnya bila dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk, ini berpengaruh terhadap semakin tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang meningkat, yang apabila hal ini kurang diantisipasi oleh tenaga kesehatan maka akan berakibat buruk dari berbagai aspek kehidupan khususnya untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pendidikan formal dan non formal dirasakan masih kurang, sehingga diperlukan untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.

6) Kurangnya Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Adanya sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program dalam bidang kesehatan. Menurut data sarana prasarana Aplikasi ASPAK mencapai 65 %. Dengan Rasio ideal sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dibandingkan jumlah penduduk diharapkan 10:100.000 penduduk. Kondisi sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Lombok Timur adalah sebesar 10 atau 1:100.000 penduduk. Namun kualitas sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan dan membutuhkan layanan segera.

7) Permasalahan Eksternal

a) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Masih Rendah

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat adalah salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lombok Timur. Persentase rumah tangga ber-PHBS tahun 2017 adalah sebesar 46,53 % (3.029 rumah tangga) dari 6510 rumah tangga yang dipantau. Pada tahun 2018 data PHBS tidak tersedia pada Dinas Kesehatan dan menggunakan Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Hasil pencapaian sementara pemantauan keluarga melalui program ini menunjukkan baru 11,17% keluarga termasuk dalam kategori keluarga sehat dengan capaian keluarga yang sudah dikunjungi sejumlah 175.270 KK atau sebesar 49,89%. Ini menunjukkan masih rendahnya kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Lombok Timur.

b) Kondisi Geografis Daerah

Kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan terhambatnya akses pelayanan kesehatan kondisi geografi dan topografi Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari perbukitan, pegunungan

dan pantai menyebabkan rawan terjadinya Kejadian Luar Biasa. Kondisi lingkungan yang kurang baik memungkinkan untuk menjadi tempat perindukan vektor penular penyakit. Keadaan geografis ini juga menghambat akses pelayanan kesehatan oleh masyarakat.

2.3.1. Masalah dan Hambatan Pelayanan Kesehatan

Hambatan yang masih ditemui dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur antara lain :

- a. Luasnya wilayah kabupaten dan kondisi geografis pada beberapa wilayah memberikan hambatan dalam akses pelayanan kesehatan dimana permasalahan utama bukan pada pembiayaan kesehatan sendiri tetapi pembiayaan sosial lainnya.
- b. Kualitas kesehatan lingkungan rendah yang berdampak kepada timbulnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan.
- c. Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin secara sinergi dimana banyak kegiatan lintas sektor yang telah dilaksanakan tetapi belum berkesinambungan dan memberikan hasil yang optimal.
- d. Pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang kesehatan yang masih rendah sehingga akan berpengaruh terhadap partisipasinya.
- e. Kebijakan dalam penyediaan tenaga kesehatan yang membatasi daerah dalam pemenuhan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan di Puskesmas sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja.

Berbagai hambatan yang ada tentunya akan memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja yang dituangkan dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan. Hambatan lain adalah bahwa pencapaian indikator makro seperti untuk SDGs yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Status Gizi bukan hanya tergantung pada sektor kesehatan saja tetapi ada peran serta sektor lain sehingga pencapaian indikator tersebut harus dikontribusikan pula dari sektor lain. Oleh karena itu perencanaan program yang komprehensif dengan melibatkan sektor terkait menjadi sangat penting untuk mengungkit keberhasilan pencapaian indikator yang ditetapkan.

2.3.2. Tantangan dan Peluang dalam Pelayanan Kesehatan

Tantangan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

- a. Adanya globalisasi pelayanan kesehatan yang menuntut kepada peningkatan kualitas pelayanan;

- b. Adanya beban ganda dalam penanggulangan penyakit oleh karena munculnya penyakit-penyakit baru dan penyakit yang sudah pernah hilang muncul kembali sehingga penanganannya membutuhkan upaya yang lebih optimal lagi;
- c. Luasnya wilayah Kabupaten dan tingginya mobilitas penduduk memberikan tantangan dalam penanganan masalah kesehatan.
- d. Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin dengan optimal dimana banyak kegiatan lintas sektor yang telah dilaksanakan tetapi belum berkembang dan berkesinambungan dengan baik.
- e. Pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang kesehatan yang masih rendah sehingga akan berpengaruh terhadap partisipasinya.

Sedangkan peluang yang muncul dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat, sebagai berikut :

- a. Adanya otonomi daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih luas pada Kabupaten merupakan peluang dalam pengembangan dan penyusunan sistem pelayanan kesehatan yang bersifat lokal spesifik.
- b. Adanya pengembangan kawasan, pelayanan kesehatan swasta dan segmen pasar, merupakan peluang dalam peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
- c. adanya kemudahan komunikasi, akan mempercepat dan meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan penanggulangan masalah- masalah kesehatan yang harus segera ditangani serta meningkatkan koordinasi.
- d. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung program-program bidang kesehatan dilihat dari prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD maupun RKPD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2020 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Review Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018 - 2023 dan juga tingkat kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Timur berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan

kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di Masyarakat.

Perbandingan rancangan awal RPKD dengan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan memiliki perbedaan, yaitu semua program yang terdapat dalam rencana kerja terdapat penambahan dan pengurangan anggaran sesuai dengan kebutuhan SKPD. Data perbandingan rancangan awal RPKD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada Bab I telah dibahas bahwa Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom-up* dan *top-down* dimana proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur, demikian juga pada proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

Usulan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan didapatkan pada proses Musrenbang baik di tingkat Kecamatan maupun pada tingkat Kabupaten, dimana usulan-usulan tersebut kemudian diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan - usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari masyarakat langsung yang terkait dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD lain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Program dan kegiatan yang bersumber masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD baik dari segi penjelasan kesehatauai tersebut maupun pada saat melakukan rekapitulasi program dan kegiatan bersumber masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2018-2023 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pada periode kedua masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia masa bakti 2018-2023, untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya misi presiden terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2018 – 2023 masih belum tersusun, jadi masih mengikuti Renstra 2015 – 2019.

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;
2. meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah :

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah :

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Sedangkan sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.
 - b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
 - b. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.
 - b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
 - c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
 - d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600.
 - b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.
 - b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.
 - c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.
 - b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.
 - c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan.
 - b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%.
 - b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
 - c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.

Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
 - b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.
 - b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
 - c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
 - b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
 - b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan *e-health* sebesar 50%.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2020, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023, dimana pembangunan bidang kesehatan masuk ke dalam misi yang Kedua RPJMD, yaitu di Misi Kedua, yaitu “**Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdayasaing dengan biaya terjangkau**”

Adapun Tujuan dari Misi Kedua ini adalah Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dan rujukan serta pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Sedangkan Sasaran dari Misi Kedua adalah: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui ketersediaan akses pelayanan kesehatan dan rujukan serta pendidikan yang bermutu, terjangkau sesuai kemampuan masyarakat. Adapun pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kedua untuk bidang kesehatan adalah Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan serta rujukan yang terjangkau.

3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengingat kemampuan anggaran dari APBD masih sangat terbatas, maka potensi anggaran dari berbagai sumber diarahkan pada program dan kegiatan yang mempunyai daya ungkit besar dalam menurunkan permasalahan kesehatan. Oleh karena itu fokus dalam menyusun program serta sasaran kegiatan akan lebih ditata dalam rencana kerja bersama antara pusat, propinsi, kabupaten serta lembaga donor dan mitra lainnya secara terpadu dalam forum perencanaan dan penganggaran terpadu di bidang kesehatan. Selanjutnya upaya tersebut akan dimonitor dan dievaluasi terpadu yang melibatkan berbagai pihak dan donor lainnya sehingga anggaran pembangunan kesehatan menjadi lebih terarah dan efisien.

Langkah yang diambil untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi anggaran adalah menyusun Rencana Kerja Terpadu dari berbagai pihak yang mempunyai program kegiatan dibidang kesehatan. Secara internal upaya tersebut diikuti dengan mengarahkan kegiatan pada prioritas masalah yang harus diselesaikan melalui kegiatan yang dibiayai baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber anggaran lain, dimana anggaran tersebut bersifat saling melengkapi sehingga tidak terjadi dikotomi dan duplikasi pembiayaan peembangunan kesehatan. Dengan demikian program pembangunan dibidang kesehatan harus terintegrasi dan terstandarisasi, sehingga tidak ada dikotomi program APBN maupun APBD. Yang akan dikembangkan adalah program pembangunan kesehatan daerah yang aktivitasnya melibatkan keterpaduan dari berbagai sumber dana dengan fokus sasaran yang sama.

Rencana program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01)

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (02)
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan (07)
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor (08)
4. Penyediaan alat tulis kantor (10)
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (11)
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor (12)
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (13)
8. Penyediaan peralatan rumah tangga (14)
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (15)
10. Penyediaan makanan dan minuman (17)
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (18).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02)

1. Pembangunan rumah dinas (02)
2. Pengadaan Kendaran Dinas/Operasioal (05)
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (22)
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (24)
5. Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan (30)
6. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas (41)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (05)

- Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional PNS (04).

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (06)

- Penatausahaan Keuangan dan Pemutakhiran Potensi PAD (05)

- 5. Program Manajemen Pengelolaan Asset / Barang Daerah (09)**
 - Peningkatan Pengelolaan Asset / Barang Daerah (SIMDA BMD) (01)
- 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (15)**
 - a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (01)
 - b. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (05)
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (06).
- 7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (16)**
 - a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (02)
 - b. Peningkatan kesehatan masyarakat (09)
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana (11)
 - d. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (13)
 - e. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan (14)
 - f. Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Remaja (16)
 - g. Pelayanan Kapasitas Petugas Pelayanan Peduli Remaja (PKPR) dan PPkt dan TPPO (17)
 - h. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) (19)
 - i. Pelayanan Kesehatan Haji (20)
 - j. Pembangunan Ruang Perawatan Kesehatan untuk Penderita Dampak Asap Rokok (38)
 - k. Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (40)
- 8. Program Pengawasan Obat dan Makanan (17)**
 - a. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan (01)
 - b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya (02)
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (05).
- 9. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia (18)**
 - a. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan diluar negeri (03)
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (06)
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Pengobatan Tradisional dan Komplementer ((07)
- 10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (19)**
 - a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (01)
 - b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (02)
 - c. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan (04)
 - d. Kesehatan Anak Sekolah dan GSS (06)
 - e. Promosi kesehatan dalam Peningkatan PHBS (07)
 - f. Peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan (08)
 - g. Promosi, sosialisasi dan koordinasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

(JPKM) (09)

11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat (20)

- a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi (01)
- b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin (02)
- c. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (03)
- d. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (04)
- e. Penanggulangan Gizi Lebih (05)
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (06)

12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat (21)

- a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (01)
- b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (02)
- c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat (03)
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) (05)

13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (22)

- a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (01)
- b. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (04)
- c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (05)
- d. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (06)
- e. Peningkatan surveilliance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (09).

14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (23)

- a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (02)
- b. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (03)
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (06)
- d. Akreditasi Puskesmas (07)
- e. Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan (08)

15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (24)

- a. Pelayanan operasi katarak (01)
- b. Pelayanan kesehatan THT (02)
- c. Pelayanan operasi bibir sumbing (03)
- d. Pelayanan sunatan masal (04)
- e. Penanggulangan ISPA (05)
- f. Penanggulangan penyakit cacangan (06)
- g. Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin (07)
- h. Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu (09)
- i. Pelayanan Kesehatan Jiwa (11)

16. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya (25)

- a. Pembangunan Puskesmas (01)
- b. Pengadaan Puskesmas Keliling (04)
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK) (07)
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (21)
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (24)
- f. Rehabilitasi Poskesdes (26)

17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (28)

- Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis (05)

20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita (29)

- a. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita (04)
- b. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak Balita (05)
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (07)

21. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia (30)

- a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan (01)
- b. Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan (03)
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (07)

22. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (32)

- a. Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu (01)
- b. Pertolongan Persalinan bagi ibu dari keluarga tidak mampu (03)
- c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (04)
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (05)

23. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (34)

- a. Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penyusunan Dokumen Pelaporan (01)
- b. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) (02)

24. Program Upaya Kesehatan Perorangan (35)

- a. Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (01)
- b. Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) NonKapitasi (02)

25. Program Sumberdaya Kesehatan (36)

- a. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan (01).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Lombok Timur, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2020. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018–2023, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

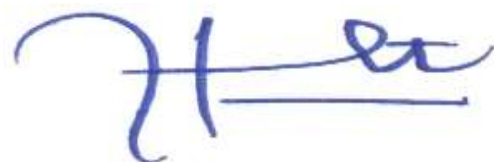
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Selong

Tanggal : Maret 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



dr.H.M. HASBI SANTOSO, M.Kes
NIP. 19660429 199703 1 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
1.02	URUSAN WAJIB KESEHATAN															
1.02.1	BIDANG KESEHATAN															
1.02.1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Kesehatan,	1 Tercapainya Peningkatan IPM		Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					685.688.500	672.676.000				
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas Kesehatan			Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon	12 Bulan	Tersedianya sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100%	189.000.000	189.000.000		1 Penyediaan biaya iuran rekening telepon kantor	Keuangan	
1.02.1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Dinas Kesehatan							17.000.000	17.000.000		3 Penyediaan biaya iuran rekening Telkom	Keuangan	
1.02.1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dinas kesehatan			Jasa Pengelola Satker	1 Paket	Terlaksananya	100%	241.070.000	287.570.000		1 Penyediaan honorarium pengelola keuangan SKPD	Keuangan	
1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinas kesehatan			Jasa Petugas Cleaning Service	12 Bulan	Tersedianya Jasa CS	100%	19.100.000	18.075.000		2 Penyediaan honorarium Tim PPHP	Keuangan	
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas kesehatan			ATK Dinas	1 Paket	Tersedianya ATK	100%	27.678.500	17.516.000		3 Pembelian meterai, perangk & benda pos lainnya	Keuangan	
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas kesehatan			Barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Tersedianya barang cetakan dan	100%	23.400.000	15.225.000		1 Pembelian ATK Rulin Kantor	Umpeg	
1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas kesehatan			Bahan komponen instalasi listrik	1 Paket	Tesedianya bahan komponen instalasi	100%	15.000.000	5.000.000		1 Pembelian alat listrik dan elektronik keperluan kantor	Umpeg	
1.02.1.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Dinas kesehatan			Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	100%	54.650.000	38.500.000		2 Penambahan daya arus listrik Sarana Yankes (Puskesmas/Jaringannya)	Umpeg	
	Penyediaan peralatan rumah tangga											10.000.000		1 Pengadaan meubelair kantor	Umpeg	
														2 Pengadaan Prasarana Gedung IFK		
1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dinas kesehatan			Bahan bacaan	96 Eksemplar	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan	96 Eksemplar	3.240.000	3.240.000		1 Pembelian surat kabar dan majalah	Keuangan	
1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas kesehatan			Makanan dan minuman rapat	24 Kali	Tersedianya keperluan	24 Paket	20.250.000	22.500.000		1 Penyediaan makanan dan minuman HKN	Keuangan	
														2 Penyediaan makanan dan minuman Lembur petugas	Keuangan	
														3 Penyediaan makanan dan minuman rapat lintas sektor dan program	Keuangan	
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Dinas kesehatan			Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 Paket	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 Kali	75.300.000	49.050.000		1 Konsultasi teknis program ke Pusat	Keuangan	
														2 Survey harga barang		
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur	100%	Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedia	100 %	Penyediaan Sarana dan Prasarana	100%	7.360.143.000	660.875.000	1.109.109.214			
	Pembangunan Rumah Dinas (Rumah Dinas tenaga medis dan paramedis)				1 Puskesmas			1 Unit		1 Unit		418.275.000		Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis	Sarpras	
	Pembangunan gedung kantor						Terwujudnya Gedung Pelayanan Public Safety Center (PSC) 119	2 Unit	tersedianya Unit Pemelihara Fasilitas	2 Unit	808.000.000			1 Pembangunan Gedung PSC	Sarpras	
														2 Pembangunan Gedung RMC	Sarpras	
1.02.1.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Dinas kesehatan			Kendaraan Operasional Kantor Tersedia		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Terjangkau		1.513.322.500		1.109.109.214	1 Pengadaan kendaraan promosi kesehatan dan mobil RMC	Sarpras	
				Dinas Kesehatan										2 Honorarium Pengelola Kegiatan	Sarpras	
														3 Penggandaan	Sarpras	
1.02.1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinas kesehatan			Gedung Kantor Terpelihara	1 Paket	Kenyamanan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi	100%	79.950.000	100.000.000		1 Pemeliharaan rutin gedung kantor dinas kesehatan	Sarpras	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas kesehatan			Kendaraan Dinas	16 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas	16 Unit	65.630.000	62.600.000		1 Pembelian BBM/G dan Pelumas	Sarpras	
1.02.1.02.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						Generator Terpelihara dengan baik	1 Unit	Terpeliharanya Generator Dinas	1 Unit	-	5.000.000		1 Pemeliharaan Generator Dinas 2 Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Sarpras	
1.02.1.02.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan			Puskesmas dan Jaringannya			Alat Kesehatan terpakai	33 Paket	Terpeliharanya alat kesehatan	100%	25.000.000	75.000.000		1 Penyediaan Jasa Petugas UPP Alkes Dinas Kesehatan	Sarpras	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Dinas Kesehatan			Direnovasinya Gedung Instalasi Farmasi Kab. Lombok Timur	1 Unit	Meningkatnya Kualitas Penyimpanan Obat	1 Unit	3.823.189.609	-		2 Perjalanan Dinas Perbaikan Alkes Puskesmas/Jaringan 3 Penyediaan Perlengkapan dan Operasional Kendaraan Bengkel Alkes Dinas Kesehatan 4 Pengadaan Suku Cadang Alkes Puskesmas/Jaringan 5 Pengadaan Peralatan Perbaikan Alkes Puskesmas/Jaringan 6 Pengadaan Peralatan Kalibrasi Alkes Puskesmas/Jaringan		
	Pengadaan sarana dan prasarana IFK			Dinas Kesehatan			Tersedianya Sarana dan	319 Unit	Adanya Sarana dan	319 Unit	1.045.050.891	-				
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100%	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur	100%	96.920.000	96.920.000				
1.02.1.02.01.05.04	Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional PNS			Dinas Kesehatan			Penilaian Kinerja Jafung Kesehatan	100 %	Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional Kesehatan	100%	96.920.000	96.920.000		1 Evaluasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan PTT	Umpeg	
1.02.1.02.01.09	Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah				Peningkatan kualitas Pengelolaan Asset/Barang Daerah	100%	Dokumen Pengelolaan Asset/Barang Daerah Tersedia	100 %	Tertatanya Pengelolaan Asset/Barang Daerah	100%	53.600.000	53.600.000		2 Rapat Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan		
1.02.1.02.01.09.01	Peningkatan Pengelolaan Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD)			Dinas Kesehatan dan Puskesmas			Dokumen Pengelolaan Asset/Barang Daerah (SIMDA)	100 %	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD)	80%	53.600.000	53.600.000		Rapat Koordinasi Pengelolaan BMD/Asel Puskesmas Rapat Rekonsiliasi SIMDA BMD Penyediaan Jasa Pengurus Barang Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Petugas Gudang Alkes Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Petugas Entry Data SIMDA BMD Dinas Kesehatan dan Penyediaan Jasa Petugas Pengolah Data Belanja Modal Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Petugas Pengolah Data Persediaan (Asel Lancar) Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Petugas Cek Fisik Kendaraan Operasional Puskesmas Penyediaan ATK, FC, Cetak Dokumen Pengelolaan Asset/Barang Dinas Perjalanan Dinas Bimtek Pengelolaan Barang Puskesmas/Jaringan Perjalanan Dinas Konsultasi Teknis Pengelolaan BMD/BMN ke Provinsi Pengadaan Media Dokumentasi Asel Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rehabilitasi Gudang Alkes Dinas Kesehatan Penyediaan Perlengkapan Penunjang Gudang Alkes Dinas Kesehatan Penyediaan Alat Pengolah Data Sarpras dan Alkes Dinas Kesehatan	Sarpras dan alkes	
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				Terselenggaranya kegiatan Peningkatan mutu penggunaan	35 Puskesmas	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah yang	35 Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan obat di	35 Puskesmas	18.660.296.712	175.466.507	8.721.474.000			
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Dinas Kesehatan			Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	90%	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah yang cukup dan merata	90%	18.597.796.712	117.047.507	8.721.474.000	1 Pengadaan Obat dan BMHP	Kefarmasian dan Makmin	
1.02.1.02.01.15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Kabupaten dan Puskesmas			Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	90%	Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	90%	50.000.000	58.419.000		1 Pertemuan Evaluasi Signap	Kefarmasian dan Makmin	
1.02.1.02.01.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Puskesmas, Apotek dan Toko Obat			Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	12.500.000	-		2 Workshop Antibiotik 3 Workshop farmasi klinis 4 Workshop CDOB 5 Pertemuan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas 1 Pembinaan Pengelolaan Obat, Penggunaan Obat secara Rasional ke Puskesmas, Pustu dan Polindes	Kefarmasian dan Makmin	
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	100%	Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100%	44.218.007.618	7.353.945.794	28.839.804.000			
1.02.1.02.01.16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat melalui kegiatan sosial dan Perkesmas	100%	Terpeliharannya kesehatan masyarakat	100%	84.168.500	84.168.500		1 Kunjungan K3 ke Puskesmas 2 Pertemuan Evaluasi K3 3 ATK Program 4 Kunjungan ke RS dalam rangka pelaporan	Yankes Rujukan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
1.02.1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat			Dinas Kesehatan			Terlaksananya Pertemuan Pengawasan Yankes Swasta	2 Paket	Peningkatan kualitas pelayanan Yankes Swasta sesuai SOP	100%	1.086.920.000	909.780.000	5 Pertemuan Sosialisasi Laboratorium, Fisioterapi, Radiologi 6 Pertemuan Lintas Sektor K3 7 Pertemuan Rujukan 8 Konsultasi ke Provinsi 9 Pertemuan Evaluasi Rujukan 10 tes kebugaran 1 Pertemuan YANKES Swasta	Yankes Rujukan		
1.02.1.02.01.16.11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana			Desa Bencana			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	100 %	Terpantainya kesehatan pengungsi korban bencana	100%	75.000.000	75.000.000	2 Pertemuan Pembinaan dan Pengawasan 3 Kunjungan Lapangan Pengajuan Izin Baru 4 Kunjungan Pembinaan dan Pengawasan 5 Belanja Pengandaan 1 Pertemuan Konsultasi dan Evaluasi kesehatan Bencana	SIK		
1.02.1.02.01.16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			Dinas Kesehatan dan Puskesmas			Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas/Jaringannya	32	Meningkatnya kinerja pelayanan Puskesmas/Jaringannya	32	7.223.992.000	5.517.169.794	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Petugas Puskesmas PTT	Keuangan		
1.02.1.02.01.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan			Kabupaten	Meningkatnya akses air bersih dan sanitasi yang layak serta	100%	Terlaksananya rangkaian kegiatan dalam meningkatkan	100%	Tercapainya akses air bersih dan sanitasi	100%	220.000.000	170.000.000	350.000.000 1 Pengadaan alat pemantauan kualitas air dan lingkungan 2 Rencana pengamanan air minum (RPAM) 3 Inspeksi sarana (SAB, TTU, TPM) 4 Surveilans kualitas air 5 pembinaan terhadap pengelola PTM dan TTU 6 Advokasi lintas sektor 7 Pengadaan Sanitarian KIT	PL		
1.02.1.02.01.16.16	Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Remaja			Kabupaten, Puskesmas, dan Sekolah SMP SMA Sederaja			Remaja mendapatkan pelayanan kesehatan.	40%	Menurunnya angka kesakitan pada usia remaja	40%	32.500.000	32.500.000	1 Pengadaan Leaflet Remaja (5 Jenis) 2 Pengadaan Timbangan dan Mikrotolice untuk petugas remaja 3 Pemeriksaan Kesehatan Anak Khusus di PSA dan SLB 4 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Remaja di Luar Sekolah/ Di dusun/ Desa	Remasia		
1.02.1.02.01.16.17	Pelayanan Kapasitas Pelugas Pelayanan Peduli Remaja (PKPR) dan PPKt dan TPPO			Kabupaten, Pantii			Terlaksananya pelayanan kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan PPKt dan TPPO	7 Puskesmas	Peningkatan pelayanan kesehatan remaja termasuk penanganan korban kekerasan dan narkoba	40%	16.842.500	16.842.500	1 Pelatihan Konseling untuk Pemegang Program Remaja	Remasia		
1.02.1.02.01.16.19	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)			Kabupaten dan Puskesmas Dinas Kesehatan, Puskesmas			Data dan peralatan untuk deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	100%	Terselenggaranya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	100%	107.500.000	134.775.000	2 Pengadaan Timbangan dan Mikrotolice untuk petugas remaja 1 Skrining Faktor Resiko PTMdan gangguan mental emosional dan perilaku 2 Pelatihan teknis pelugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan pelugas pelaksana (kader) Posbindu PTM 3 Pelatihan surveilans faktor resiko PTM berbasis web 3 Belanja pengadaan dan cetak program PTM 4 Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM) 5 Skrining faktor resiko hipertensi menurut wilayah kerja FKTP 6 Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi 7 Penyediaan obat hipertensi 8 Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan 9 Pelatihan surveilans faktor resiko hipertensi berbasis web 10 Skrining faktor resiko DM menurut wilayah kerja FKTP 11 Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan 12 Pelatihan surveilans faktor resiko DM berbasis web 13 Penyediaan peralatan kesehatan DM termasuk HbA1C 14 Penyediaan obat DM 15 Skrining Kanker menurut wilayah kerja FKTP 16 Pelatihan teknis deteksi dini kanker bagi tenaga kesehatan 17 Penyediaan peralatan deteksi dini kanker 18 Advokasi dan Sosialisasi penyakit tidak menular 19 Penyediaan honorarium pelugas kabupaten dalam rangka pengolahan & analisa data program PTM 20 Belanja ATK Program PTM 21 Belanja pengadaan dan cetak program PTM 22 Pengadaan kamera untuk dokumentasi kegiatan	P2 Penyakit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
1.02.1.02.01.16.20	Pelayanan Kesehatan Haji			Dinas Kesehatan dan Puskesmas			Terlaksananya kegiatan pelayanan calon jemaah haji	100 %	Terpantaunya kesehatan calon jemaah haji	100%	46.000.000	51.000.000		23 Pengadaan LCD Proyektor 24 Konsultasi Program PTM ke Dinkes Propinsi NTB 25 Konsultasi Program PTM ke Kemenkes RI 26 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skrining 27 Pengadaan Co_Analyzer 1 Pertemuan Koordinasi Program Haji	P2P	
1.02.1.02.01.16.40	Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)			Puskesmas			Tersedianya Biaya BOK Puskesmas	1 Paket	Terlaksananya program promosi dan preventif Puskesmas	35 Puskesmas	33.170.084.618		28.489.804.000	1 Biaya Operasional Puskesmas	Yankes Primer	
1.02.1.02.01.16.41	Kewaspadaan dini terhadap bencana			Dinas Kesehatan				100%	Terlaksananya kwaspadaan Dini	100%	75.000.000	282.710.000		1 Belanja Tanggap darurat	Yankes rujukan	
1.02.1.02.01.16.42	Kesehatan Kerja dan Olahraga			Dinas Kesehatan			Jumlah karyawan yang mendapat pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja di Dinas Kesehatan Kab. Lotim	100%	Semua karyawan mengetahui kondisi kesehatan dan keselamatan kerjanya	100%	80.000.000	80.000.000		1 Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan berkala bagi karyawan dinas kesehatan kab.Lombok Timur 2 Kegiatan Workshop PAK dan PAHK 3 Risk Analisis Dinas Kesehatan Kab. Lotim dan jaringannya	Yankes rujukan	
1.02.1.02.01.16.43	Peningkatan mutu pelayanan dan penunjang rumah sakit						Terselenggaranya kegiatan pelayanan dan penunjang di rumah sakit	30%	Kinerja pelayanan di rumah sakit meningkat	30%	2.000.000.000	0		1 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2 Insentif tenaga kesehatan 3 Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan / Non Kesehatan	Keuangan	
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan				Meningkatnya kualitas Pengawasan Obat dan Makanan di Masyarakat	100%	Terlaksananya pengawasan obat dan makanan	100 %	Peningkatan kualitas penggunaan obat dan produksi pangan	100%	30.000.000	44.081.000		55.839.000		
1.02.1.02.01.17.01	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan						Jumlah IRT yang memiliki sertifikat IRT	100%	Meningkatnya Kesadaran pemilik sarana IRT akan pentingnya PKP	100%	10.000.000	44.081.000		1 Penyuluhan Keamanan Pangan di Kabupaten		
1.02.1.02.01.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya			Desa dan Sekolah			Jumlah IRT yang memiliki sertifikat IRT	100%	Meningkatnya Kesadaran pemilik sarana IRT akan pentingnya PKP	100%	12.500.000	-	55.839.000	1 Penyuluhan Keamanan Pangan di Kabupaten	Kefarmasian & Makmin	
1.02.1.02.01.17.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						Terbinanya sarana swasta	100%	sarana swasta melaksanakan pelayanan kefarmasian	100%	7.500.000	-		1 Pembinaan ke Sarana Swasta	Kefarmasian & Makmin	
1.02.1.02.01.18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia				Tercapainya Pengembangan Obat Asli Indonesia	1 Paket		1 Paket		1 Paket	15.000.000	15.000.000				
1.02.1.02.01.18.03	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri			Dinas Kesehatan			Masyarakat aman dari bahan berbahaya	100%	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pangan dan obat yang aman	100%	10.000.000	10.000.000		1 Sosialisasi Obat Bahan Alam bagi Pengobat Tradisional	Kefarmasian & Makmin	
1.02.1.02.01.18.06	Pembinaan dan pengawasan pengobalan tradisional dan komplementer			Desa			Terdatanya UJG dan UJR	100%	tersedianya data UJG dan UJR di Kabupaten	100%	5.000.000	5.000.000		1 Pembinaan dan Pendataan UJG dan UJR	Kefarmasian & Makmin	
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyebarluasan informasi Program Jaminan Kesehatan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu			Terlaksananya penyebaran informasi kesehatan masyarakat	100%	Masyarakat dan keluarga memahami program Jaminan Kesehatan Nasional	100 %			571.646.000	617.619.000				
1.02.1.02.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			Kabupaten			Terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai macam media promosi	100%	masyarakat memperoleh informasi kesehatan melalui berbagai media meningkat	80%	173.750.000	164.650.000		1 1. Pembuatan Buletin Kesehatan. 2 Pembuatan leaflet, poster, benner, khotbah kesehatan. 3 Kerjasama dengan stasiun Televisi dan media cetak dalam penyebarluasan informasi kesehatan. 2 Penyebarluasan informasi melalui kelompok-kelompok potensial 2 Pengambilan data Nakes 3 Pengumpulan data nakes 4 Pengolahan data hasil pengumpulan nakes	Promkes dan PSM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
1.02.1.02.01.19.06	Kesehatan Anak Sekolah dan GSS			Kabupaten, Kecamatan, Sekolah-Sekolah (SD,SMP, SMA)			Terlaksananya kegiatan-kegiatan UKS dan Gerakan Sekolah Sehat dalam rangka meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah	100%	Meningkatnya kesehatan anak usia sekolah dan lingkungan sekolah serta seluruh warga sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.	80%	33.550.000	34.770.000	5 Pengadaan ATK 6 Pertemuan dengan inslitusi pendidikan 7 Membuat Dokumen deskripsi lotim 1 Pertemuan Lintas Sektor TP. UKS tentang Revitalisasi Prog. UKS. 2 Pembinaan Sekolah Model oleh petugas kabupaten dan Puskesmas. 3 Pembinaan Lomba sekolah Sehat Tingkat Kabupaten/ Provinsi oleh Petugas Kabupaten dan Puskesmas. 4 Perjalanan luar daerah dalam rangka konsultasi prog. UKS ke Propinsi dan pusat. 5 Pertemuan Koordinasi TP. UKS Tingkat Kabupaten dan Kecamatan 6 Pertemuan Koordinasi TP. UKS Tingkat Kabupaten dan Kecamatan. 7 Peningkatan kapasitas petugas UKS 8 Sosialisasi Program Sakura. 9 Pembinaan Program sakura melalui kegiatan Ekstrakurikuler.	Promkes dan PSM		
1.02.1.02.01.19.07	Promosi kesehatan dalam Peningkatan PHBS			Kabupaten, Kecamatan, Puskesmas, Desa, UKBM			Terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan Rumah tangga ber PHBS	100%	Meningkatnya pengetahuan dan sikap masyarakat untuk membudayakan PHBS	65%	51.104.000	61.168.750	1 Rapat Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pelaksanaan Pebinaan PHBS 2 Pembinaan PHBS 3 Monev Program PHBS 4 Evaluasi Tahunan Program Promkes 5 Pertemuan Koordinasi Kegiatan PHBS dengan Ormas dan Majelis taklim 6 Penguatan jejaring Kemitraan Program PHBS Tingkat Kabupaten 7 Lomba Desa PHBS 8 Sosialisasi Program Keluarga Sehat 9 Pelatihan Keluarga sadar Sehat bagi Petugas Pusk 10 Pendataan dan Pembinaan Kelurga Sehat. 1 Pembentukan Desa SiagaModel	Promkes dan PSM		
1.02.1.02.01.19.08	Peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan			Kabupaten, Kecamatan, Puskesmas, Desa, UKBM			Terselenggaranya kegiatan penggalangan UKBM	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat	80%	79.215.000	77.030.250	2 Pembentukan UKBM 3 Orientasi Kader, Forum Desa Siaga 4 Pembinaan UKBM 1 Pertemuan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta dukungan manajemen 2 Pembayaran iuran kepesertaan JKN dan bantuan pembiayaan kesehatan emergency bagi maskin dan tidak mampu 3 Pertemuan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data pembiayaan kesehatan 1 Verifikasi Penerima Bansos/Hibah	Promkes dan PSM		
1.02.1.02.01.19.09	Promosi, sosialisasi dan koordinasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)			Dinas Kesehatan dan Puskesmas			Masyarakat dan keluarga memahami program Jaminan Kesehatan Nasional	100%	Terlaksananya penyebaran informasi jaminan kesehatan nasional	100%	211.527.000	257.500.000	1 Pertemuan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta dukungan manajemen 2 Pembayaran iuran kepesertaan JKN dan bantuan pembiayaan kesehatan emergency bagi maskin dan tidak mampu 3 Pertemuan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data pembiayaan kesehatan	Seksi Pembiayaan		
1.02.1.02.01.19.10	Verifikasi dan Evaluasi Penyaluran Hibah/Bantuan Sosial			Dinas Kesehatan			Tersedianya Biaya Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Sosial/Hibah	1 Kali	Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Sosial/Hibah Terlaksana	1 Kali	22.500.000	22.500.000	1 Verifikasi Penerima Bansos/Hibah			
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						Tarlaksananya Perbaikan Gizi Masyarakat	100%		100%	175.098.500	175.098.500				
1.02.1.02.01.20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi			Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten			Puskesmas pelaksana Survey PSG	100%	Tersedianya Data PSG Tingkat kabupaten Lombok Timur	100%	30.009.500	50.552.500	1 Orientasi PSG 2 Survey PSG Tingkat Kecamatan 3 Suveylance gizi di puskesmas yang aktif	Gizi		
1.02.1.02.01.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin			Kabupaten dan Puskesmas			Tersedianya PMT Pemulihan bagi Balita Gizi Buruk	100%	Peningkatan penyembuhan balita gizi buruk	100%	43.360.500	69.215.500	4 Pekan / Bulan Penimbangan 1 PMT dan Vitamin bagi Balita gizi buruk 2 PMT Bumi KEK 3 MP-ASI balita kurang Gizi 4 Pemberian Tablet Besi (Fe) bagi ibu hamil dan remaja putri 1 Perawatan balita gizi buruk	Gizi		
1.02.1.02.01.20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya			Desa, Puskesmas dan Kabupaten			Terlaksananya Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro	80%	Penurunan Prevalensi Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro	20%	40.373.500	32.920.500	2 Penunggu pasien gizi buruk 3 Distribusi Fe untuk Ibu Hamil dan Remaja Putri 4 Orientasi PMBA Bagi Petugas 5 Distribusi Vitamin A Untuk Balita dan untuk Ibu Nifas 6 Survey Gaber Tingk Rumah Tangga 7 Penyuluhan Gaber di posyandu dan institusi/sekolah 8 Survey anemia remaja	Gizi		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
1.02.1.02.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi						Jumlah desa KADARZI	1 Desa	Meningkatnya kesadaran keluarga terhadap masalah gizi (KADARZI)	1 Desa	14.143.000	16.531.500		9 Pemberian Fe untuk remaja putri 10 Kelas Gizi 11 Pembentukan KP-ASI 12 Orientasi PMBA Bagi Petugas 13 Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan bagi Petugas 14 Tatalaksana Gizi Buruk di Puskesmas 15 Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan bagi kader 16 Orientasi PMBA Bagi Kader 16 Pembinaan Desa Kadarzi 16 Pemantauan Pertumbuhan di posyandu 16 Pengadaan Antropometri kit	Gizi	
1.02.1.02.01.20.05	Penanggulangan Gizi Lebih						Pemantauan Pertumbuhan dan Penyuluhan di posyandu	100%	Menurunnya prevalensi Gizi Lebih	100%	19.488.000	5.878.500		1 Pemantauan Pertumbuhan dan Penyuluhan di Posyandu	Gizi	
1.02.1.02.01.20.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Provinsi & Kabupaten			Melakukan Monitoring dan evaluasi ke semua Puskesmas	100%	Semua Puskesmas di monitoring dan evaluasi	100%	27.724.000	0		2 Pemantauan Pertumbuhan dan Penyuluhan di Instansi/sekolah 3 Kelas Gizi 1 Pertemuan Evaluasi Program Gizi setiap triwulan	Gizi	
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					100%	Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat	100 %			42.500.000	82.500.000		2 Bimlek Program Gizi 3 Konsultasi Program Gizi ke propinsi 4 Konsultasi Program Gizi ke Pusat		
1.02.1.02.01.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat			Lombok Timur		254	Meningkatnya jumlah Desa BASNO/ODF	254	Terselenggaranya rangkaian kegiatan dalam meningkatkan jumlah Desa BASNO/ODF	254	15.000.000	15.000.000		1 Pemicuan STBM	PL	
1.02.1.02.01.21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat			Kabupaten			Terselenggaranya rangkaian kegiatan dalam meningkatkan jumlah rumah sehat	75%	Meningkatnya jumlah rumah sehat	75%	15.000.000	15.000.000		2 monev pasca pemicuan 3 membangun jejaring wira usaha sanitasi 4 advokasi dan monitoring 1 Pemetaan klinik Sanitasi	PL	
1.02.1.02.01.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat			Kabupaten			Tersosialisasinya Pengelolaan Limbah Fasyankes	1 Keg	Tersosialisasinya Pengelolaan Limbah Fasyankes	1 Keg	12.500.000	12.500.000		2 Follow Up Hasil Konseling 3 Survei Perumahan dan Lingkungan 4 Monev dan Lintas Sektor 1 Penguatan Kapasitas Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Rumah Sehat 2 Pelatihan Mentoring WUSAN 3 Pendampingan dan Monitoring Tim STBM Puskesmas 4 Sosialisasi Pengelolaan Limbah Fasyankes	PL	
1.02.1.02.01.21.04	Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)			Kabupaten			Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) di Fasyankes	100%	Meningkatnya jumlah fasyankes yang memiliki UKL/UPL	100%		40.000.000		1 Pengadaan Dokumen UKL/UPL puskesmas Lb. Lombok, Suralaga, Pengadangan, Almet Utara, Batuyang relokasi)		
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					100%	Tersedianya dokumen AMDAL	100%	Tersedianya dokumen AMDAL	100%	394.055.000	422.365.000		1.343.717.536		
1.02.1.02.01.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk			Wilayah Kerja Puskesmas			Terlaksananya kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk	100 %	Peningkatan Angka Bebas Jentik > 95%	100%	125.000.000	87.350.000		55.902.000	1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	SIK
1.02.1.02.01.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah			Dinkes Kabupaten, Dinkes Provinsi, Puskesmas,			Terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	80%	Peningkatan cakupan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	100%	104.805.000	104.805.000		2 Penyediaan honorarium petugas kabupaten dalam rangka kegiatan PWS 3 Penyediaan honorarium petugas kabupaten dalam rangka kegiatan SMS	SIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
1.02.1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			Dinkes Kabupaten, Puskesmas, Dinkes Provinsi			Terlaksananya penemuan kasus TB BTA+ dan Kusta baru	70 %	Peningkatan pengobatan kasus TB BTA+ dan Kusta baru	100%	78.000.000	106.700.000	1.127.815.536	4 Penyediaan honorarium petugas RSU dalam rangka pengolahan data imunisasi 5 Penyediaan honorarium petugas kabupaten dalam rangka pengelolaan logistik dan vaksin 6 Pertemuan/Evaluasi program imunisasi 7 Belanja ATK program imunisasi 8 Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan vaksin & logistik rutin 9 Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan vaksin & logistik BIAS 10 Konsultasi program ke dinkes propinsi 11 Pemantauan kasus KUPI 12 Pelatihan vaksinator Puskesmas 13 Kegiatan pemantauan pelaksanaan BIAS 14 Pembentukan Komda KUPI kabupaten 1 Belanja ATK program imunisasi	P2 Penyakit	
1.02.1.02.01.22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik			Puskesmas			Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan	100 %	Peningkatan penanganan penyakit	100%	23.750.000	-		2 Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan vaksin & logistik BIAS 3 Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan vaksin & logistik BIAS 1 Penyediaan honor petugas kab. & pus. Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data diare 2 Pertemuan petugas dalam rangka konsultasi program diare 3 Sosialisasi program hepatitis 4 Bimtek program diare 5 Bimtek tatalaksana penderita diare 6 Konsultasi program ke propinsi 7 Penyediaan honor petugas kab. & pus. Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data malaria 8 Pertemuan petugas dalam rangka konsultasi program malaria 9 Sosialisasi pembentukan kelompok bebas malaria di daerah endemis 10 Bimtek program malaria 11 Pengawasan pembersihan lumut di lagoon 12 Refresing petugas mikroskopis dalam rangka penanggulangan malaria	SIK	
1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah			Puskesmas			Terlaksananya pemantauan penyakit potensial wabah dan	100 %	Teridentifikasinya peningkatan kasus	100%	62.500.000	62.500.000		1 Penyediaan honor tim dalam rangka Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Potensial KLB 2 Penyediaan honor tim dalam rangka penyelidikan epidemiologi penyakit potensial wabah 3 Penyediaan honor tim dalam rangka penguatan jejaring surveilans epidemiologi tingkat Kabupaten 4 Penyediaan honor tim dalam rangka penguatan jejaring surveilans epidemiologi tingkat Puskesmas 5 Pengadaan ATK	SIK	
1.02.1.02.01.23	Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria Pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan frambusia Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis Pencegahan dan pengendalian penyakit diare dan infeksi saluran pencernaan (ISP)											46.010.000	160.000.000	1 Pengadaan BMHP Malaria		
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			Terstandarisasi Pelayanan Kesehatan	29 Puskesmas			100 %			3.266.771.472	742.630.000	2.427.575.000			
1.02.1.02.01.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan			Dinas Kesehatan			terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	100%	peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen	100%	116.500.000	226.500.000		1 Pelatihan Manajemen Puskesmas 2 Pelatihan keterampilan dan peningkatan kemampuan perawat fungsional dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rawat Inap 3 Pelatihan keterampilan tenaga dokter dan perawat dalam pemberian pelayanan kesehatan standar PPGD di Puskesmas 4 Lomba Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas Tk. Kabupaten 5 Bimtek Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 6 Evaluasi pelayanan Kesehatan Tradisional 7 Workshop Pelayanan Kesehatan Tradisional 8 Pelatihan Asuhan Keperawatan bagi Perawat tenaga Fungsional pada pelayanan Kesehatan 9 Pelaksanaan penilaian kinerja Puskesmas 10 Pelaksanaan Lomba FKTP Berprestasi 11 ATK program 12 Pelatihan BTCLS 13 Evaluasi Kegiatan Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut 14 Bimtek pelayanan GIGI di puskesmas 15 Konsultasi program ke Provinsi	Yankes primer	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
1.02.1.02.01.23.03	Pembangunan dan pemeliharaan data dasar standar pelayanan kesehatan			Dinas Kesehatan			terlaksananya validasi data dasar standar pelayanan kesehatan di puskesmas	1 kl	peningkatan kualitas data dasar standar pelayanan kesehatan di puskesmas	29 puskesmas	20.000.000	20.000.000		1 Pengelolaan Data Dasar Seksi yankes primer	Yankes Primer	
1.02.1.02.01.23.06	Monitoring evaluasi dan pelaporan			Puskesmas			terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program	29 puskesmas	peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan	29 puskesmas dan jaringannya	10.000.000	0		2 Konsultasi kegiatan ke Pusat/provinsi 3 Pelaksanaan survey kepuasan Pasien di Puskesmas 4 ATK Program	Yankes primer	
1.02.1.02.01.23.07	Akreditasi Puskesmas			Puskesmas			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	14 Puskesmas	Tersedianya Puskesmas Terakreditasi sesuai	14 Puskesmas	2.688.171.472	56.130.000	2.427.575.000	1 Workshop Pelaksanaan Audit internal dan Tinjauan Manajemen 2 Workshop keselamatan Pasien 3 Workshop Penggalangan komitmen akreditasi Puskesmas 4 Workshop pemahaman standar dan instrumen akreditasi Puskesmas 5 self assessment dan penyusunan POA akreditasi di Puskesmas 6 penyusunan dokumen akreditasi di Puskesmas 7 implementasi dokumen akreditasi di Puskesmas 8 Penilaian pra akreditasi di Puskesmas pasca akreditasi di Puskesmas 9 Survey Akreditasi Puskesmas	Yankes Primer	
1.02.1.02.01.23.08	Perjinan Sarana Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan					Terlaksananya sistem perizinan sarana pelayanan kesehatan	100%	Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	100%	32.100.000	40.000.000		1 Pertemuan sosialisasi perijinan 2 Pengurusan ijin sarana kesehatan 3 Peninjauan/ pemeriksaan lapangan Yankes dan sarana pengajuan izin baru	Yankes Rujukan	
1.02.1.02.01.23.09	BLUD Puskesmas	Puskesmas					Terlaksananya BLUD di Puskesmas	100%	Tersedianya Puskesmas Dengan Sistem Layanan BLUD di Puskesmas Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Timur	100%	400.000.000	400.000.000		1 Pelaksanaan BLUD Puskesmas		
1.02.1.02.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	100%		100 %			110.958.000	215.178.000	1.564.229.250			
1.02.1.02.01.24.01	Pelayanan operasi katarak			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Terlaksananya skrining dan operasi katarak	2 kali	Penurunan kasus katarak	50%	10.000.000	15.000.000		1 Skrining dan operasi katarak	Yankes Rujukan	
1.02.1.02.01.24.02	Pelayanan Kesehatan THT			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Terlaksananya Pelayanan THT	1 kali	Terlaksananya Pelayanan THT	1 Kali	5.000.000	10.000.000		1 Pelayanan Kesehatan THT	Yankes Rujukan	
1.02.1.02.01.24.03	Pelayanan operasi bibir sumbing			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Terlaksananya penemuan dan pendampingan pelayanan operasi bimbing sumbing	75 % Kasus	Penurunan kasus bibir sumbing	50%	8.020.000	25.700.000		1 Skrining kasus bibir sumbing di masyarakat 2 Pelaksanaan operasi bibir sumbing	Yankes Rujukan	
1.02.1.02.01.24.04	Pelayanan Sunatan Masal			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Terlaksananya kegiatan sunatan masal	4 Kali	Sunatan Masal	4 Kali	7.938.000	7.938.000		1 Sunatan Masal	Yankes Rujukan	
1.02.1.02.01.24.05	Penanggulangan ISPA						Terlaksananya penanggulangan penyakit ISPA/Pneumonia	100 %	Peningkatan cakupan penanganan penyakit ISPA	100%	7.500.000	12.500.000		1 Pelatihan peningkatan kapasitas bagi petugas Pustu dan Polindes dalam rangka penanganan kasus pneumonia	P2 Penyakit	
1.02.1.02.01.24.06	Penanggulangan penyakit cacangan			Dinkes Kabupaten, Dinkes Provinsi, Puskesmas,			Terlaksananya upaya pencegahan penyakit kecacangan pada siswa SD/MI dan Balita	100 %	Penurunan kasus kecacangan pada anak sekolah dan balita	100%	5.000.000	10.000.000		1 Survey kecacangan pada anak sekolah	P2 Penyakit	
1.02.1.02.01.24.07	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin						Terlaksananya penemuan, pengobatan penyakit IMS dan HIV/AIDS	80 %	Penurunan kasus penyakit IMS dan HIV/AIDS	80%	37.500.000	61.200.000	1.564.229.250	1 Pertemuan evaluasi program HIV/AIDS 2 Pelatihan / Refreshing petugas Program HIV/AIDS 3 Penyediaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV 4 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan CD4	P2 Penyakit	
1.02.1.02.01.24.09	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu						Terlaksananya surveilans AFP di Puskesmas	100 %	Peningkatan capaian surveilans AFP	8 kasus	5.000.000	22.840.000		1 Sosialisasi Program AFP 2 Bimtek Program AFP 3 Konsultasi program AFP ke propinsi 4 Pengiriman sampel penderita ke propinsi	SIK	
1.02.1.02.01.24.11	Pelayanan Kesehatan Jiwa			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Pelaksanaan WorkshoP Pelayanan Kesehatan Jiwa	29 Puskesmas	Peningkatan kapasitas penemuan dan pelayanan kesehatan	32 Puskesmas	25.000.000	50.000.000		1 Whokshop Kesehatan Jiwa 2 Pertemuan orientasi kader kesehatan jiwa	P2 Penyakit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
1.02.1.02.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya				Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas/jaringannya	34 Puskesmas		100 %			75.222.240.128	12.335.202.000		15.939.518.000	3 Skrining dan Pengawasan Pasien Jiwa di Pasung	
1.02.1.02.1.25.01	Pembangunan puskesmas					4 Puskesmas	Terlaksananya pembangunan ruang kerja puskesmas	4 Unit	Penambahan ruang kerja puskesmas	4 Unit	50.502.746.500	7.933.160.000		7.724.815.768	1 Pembangunan baru puskesmas	
	Pembangunan Puskesmas Pembantu				terlayani masyarakat dengan optimal	100%	Terbangunnya 4 unit pustu	4 unit	Pembangunan pustu	4 Unit		1.689.067.000			1 Pembangunan Pustu	
	Pengadaan Puskesmas Keliling				Terlaksananya Pengadaan Prasarana Puskesmas keliling (DAK)	3Unit	Terlaksananya Pengadaan Prasarana Puskesmas keliling (DAK)	3 Unit			305.520.000	1.107.200.000		350.000.000	1 Pengadaan Pusing Single Gardan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)				Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	228 Paket	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	228 Paket			18.324.629.628	16.700.000		7.046.702.232	1 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	
					Terlaksananya Pengadaan Prasarana Sarana Air Bersih(DAK)	1 Unit	Terlaksananya Pengadaan Prasarana Sarana Air Bersih(DAK)	1 Unit						200.000.000	2 Pengadaan instalasi air bersih puskesmas	
					Terlaksananya Pengadaan Prasarana IPAL(DAK)	1 Unit	Terlaksananya Pengadaan Prasarana IPAL(DAK)	1 Unit						618.000.000	3 Pengadaan instalasi pengolahan air limbah puskesmas	
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu				Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu		Terpeliharanya bangunan fisik puskesmas pembantu				4.738.744.000	1.060.800.000			1 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	
	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas					4 unit	Terlaksananya rehabilitasi puskesmas	4 unit	Terpeliharanya bangunan fisik puskesmas		1.350.600.000	528.275.000			1 Rehabilitasi Puskesmas	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata										11.265.000.000					
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit						Tersedianya Alat Kesehatan Rumah Sakit	30%	Rumah Sakit Baru Bisa Beroperasi	30%	8.607.076.000				1 Pengdaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Lb.Haji	Sarpras
	Pengadaan ambulance/mobil jenazah						Tersedianya Ambulance dan Mobil Jenazah di Rumah Sakit	3 Unit	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	3 Unit	1.205.481.000				1 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Rumah Sakit	Sarpras
	Pengadaan mebeleur rumah sakit						Tersedianya Meubelair Rumah Sakit	30%	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	30%	407.481.000				1 Pengadaan Meubelair Peralatan Kantor dan Pengadaan Meubelair Peralatan Penunjang Medis	Sarpras
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)						Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	30%	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	30%	487.481.000				1 Pengadaan Peralatan Laundry	Sarpras
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit						Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	557.481.000				2 Pengadaan Alat Gizi dan Pantry	Sarpras
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				Peningkatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100%		100 %			31.000.000	31.000.000				
	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis			Puskesmas_Pustu Dan Polindes			Terlaksananya penilaian paramedis dan medis Puskesmas	1 kali	Peningkatan kemitraan peningkatan kualitas	1 kali	31.000.000	31.000.000			1 Rapat Koordinasi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	yankes primer
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			Dinas Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak	100%		100 %			69.500.000	74.500.000				
	Penyuluhan kesehatan anak balita						Terlaksananya kegiatan AMP Kabupaten	2 Kali	Tercapainya kesepakatan lintas	2 Kali	25.000.000	35.000.000			1 Orientasi Penangan Asfiksia dan BBLR	
	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Terlaksananya pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	4 kali	Peningkatan kapasitas petugas pengelola KIA Puskesmas/Jaringanny	4 kali	39.500.000	39.500.000			1 Pelaksana Kegiatan Orientasi SDDITK	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Dinas Kesehatan &			Terlaksananya monitoring	2 k/th	Monitoring dan	2 k/th	5.000.000					
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	35 Puskesmas		100 %			52.500.000	66.695.000				
	Pelayanan pemeliharaan kesehatan			Kabupaten & Provinsi			Terlaksananya pelayanan	40 %	Peningkatan capaian	35 Puskesmas	25.000.000	41.695.000			1 orientasi program calon pengantin (Calin	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14		15	16	
	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Usia Lanjut Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kabupaten Kabupaten dan Puskesmas			Terlaksananya Pelatihan Perawatan Kesehatan Usia Lanjut Monitoring evaluasi dan pelaporan	40 % 1k/th	Peningkatan kapasitas petugas perawatan Monitoring evaluasi dan pelaporan	35 Puskesmas 1k/th	25.000.000 2.500.000	25.000.000 -		1 Orientasi Peningkatan Program Puskesmas Santun Lansia Untuk Penerapan One Day Care		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu			Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keselamatan Ibu	100%	Terlaksananya pelatihan SDIDTK bagi Bidan Desa	3 Paket	Peningkatan kapasitas bidan dan program	3 Kali	2.725.025.317 63.500.000	162.500.000 62.500.000	- 3.792.720.000	1 Orientasi Fasilitator Kelas Ibu bagi Bdan Desa 2 Orientasi Kelas Parana 3 Pertemuan dalam rangka Pelatihan PONED 4 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu		
	Pertolongan persalinan bagi ibu dan keluarga kurang mampu			Kabupaten dan Puskesmas			Terlaksananya pertolongan persalinan bagi ibu hamil, bersalin	95%	Persalinan ibu hamil, bersalin dan nifas serta	95%	2.559.035.317		3.792.720.000	1 Pertemuan Penguatan Komitmen Stakeholder dalam penurunan AKI dan AKN 2 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam penanganan Kegawatdaruratan maternal Neonatal 3 Pertemuan Penguatan Sistem Rujukan dlm Penurunan AKI dan AKN 4 Pertemuan koordinasi dalam Rangka Penurunan AKI dan AKN 5 Pertemuan DRK 6 Pengiriman SHK ke Kabupaten 7 Pelayanan Persalinan di faskes 8 Pemeriksaan Spesimen Bayi 9 Rujukan Persalinan Ke RTK dan Puskesmas 10 Rujukan Persalinan Ke Rumah Sakit 11 Pelayanan KB Pasca Persalinan		
	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan Anak						Terlaksananya pertemuan APN Tk Kab Lotim	100%	Peserta memahami penyebab kasus	100%	100.000.000	100.000.000		1 Pelaksanaan kegiatan Review APN 2 Pelaksanaan kegiatan MTBS 3 pelaksanaan kegiatan PPGDON		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelaksanaan BLUD			Puskesmas			Monitoring evaluasi dan	1k/th	Monitoring evaluasi	1k/th	2.490.000	25.347.401.582 25.347.401.582				
	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan				Tersedianya Dokumen Program dan Pelaporan Dinas			100 %		100%	187.289.500	149.078.400				
	Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penyusunan Dokumen Pelaporan			Dinas Kesehatan			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Dinas	100 %	Tersedianya Dokumen Anggaran dan	100%	93.465.000	76.695.000		1 Kegiatan Perencana Pembangunan Bidang Kesehatan 2 Monitoring dan Evaluasi DAK/DAU 3 Kegiatan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah 4 ATK Penyusun Dokumen Perencanaan dan Anggaran 5 Penggandaan Dokumen RKA/RKAP Untuk Pembahasan 6 Penggandaan Dokumen Perencanaan 7 Penjilidan dokumen perencanaan 8 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9 Perjalanan Dinas Luar Daerah		
	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)			Dinas Kesehatan dan Puskesmas			Tersusunnya pengembangan SIKDA di Puskesmas	32 Puskesmas	Peningkatan kualitas data dan informasi kesehatan di Puskesmas	32 Puskesmas	93.824.500	72.383.400		1 Penyusun Profil dan Laporan Tahunan 2 Penyusun Dokumen SPM Bidang Kesehatan 3 Pengelola Sistem Informasi Kesehatan, PPID dan SIPD 4 panitia pemutakhiran data profil 5 Pengelolaan SIK Kabupaten 6 pertemuan pemutakhiran Data Profil Kesehatan 7 Cetak Dokumen Sistem Informasi Kesehatan		
	Program Upaya Kesehatan Perorangan Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Puskesmas Puskesmas	Terlaksananya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat	60%	Terselenggara nya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100%	Terlaksananya pelayanan kesehatan	100%	#REF! 66.046.125.811	#REF! 37.537.105.000	#REF! #REF!	1 Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019	Perkiraan Maju Tahun 2020			Jenis Kegiatan/Aktivitas	Seksi PJ
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			APBD KAB	APBD PROP	APBN		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
	Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Non Kapitasi Peningkatan penanggulangan narkoba			Puskesmas			terselenggaranya pelayanan kesehatan yang standar bagi masyarakat miskin dan tidak	100%	teraksrahannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak	100%	21.862.400.000	21.862.400.000 81.715.000		1 Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Non Kapitasi 1 Bahan Pemeriksaan Narkoba Bagi ASN di Lingkup PEMDA Kabupaten Lombok Timur		

